



2023 LAPORAN KINERJA

KANTOR REGIONAL IX
BKN JAYAPURA

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan penyertaan-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara Tahun 2023 dapat disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban akuntabilitas dan transparansi kinerja Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara Jayapura yang di dalamnya menguraikan rencana kerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kerja tersebut, dan realisasi anggaran.

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara Jayapura mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja menyajikan informasi terkait pencapaian kinerja dari sasaran strategis Kantor Regional IX BKN Jayapura Tahun 2020-2024 yang menyajikan analisa antartarget dan realisasi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi kinerja kepada publik tentang capaian kinerja Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara Tahun 2023 dalam hal Pelayanan Kepegawaian kepada masyarakat dan kendala-kendala yang dihadapi untuk dapat dijadikan acuan guna meningkatkan prestasi kerja dan sebagai bahan evaluasi dalam memperbaiki kinerja Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara.



Sabar Parlindungan Sormin, S.KOM, MMSI
Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura



DAFTAR ISI

- I Kata Pengantar
- II Daftar Isi
- III Daftar Tabel
- IV Daftar Grafik
- V Daftar Gambar

PENDAHULUAN

Latar Belakang
Tugas Pokok Dan Fungsi
Struktur Organisasi
Sumber Daya
Sarana Dan Prasarana
Sistematika Pelaporan

PERENCANAAN KINERJA

Visi Dan Misi
Tujuan Dan Sasaran Strategis
Perjanjian Kinerja
Rencana Kerja Dan Anggaran

AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Kanreg IX Jayapura
Realisasi Anggaran

PENUTUP

Kesimpulan

DAFTAR TABEL

- 2.1 Penetapan Perjanjian Kinerja Kanreg IX BKN Jayapura Tahun 2023
- 2.2 Perbandingan Target Pk 2023 Kanreg IX BKN Jayapura
- 2.3 Pagu Anggaran Kanreg IX BKN Jayapura Tahun 2023
- 3.1 Realisasi Kinerja IKU 1
- 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 1
- 3.3 Efisiensi Sumber Daya IKU 1
- 3.4 Realisasi Kinerja IKU 2
- 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 2
- 3.6 Efisiensi Sumber Daya IKU 2
- 3.7 Realisasi Kinerja IKU 3
- 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 3
- 3.9 Efisiensi Sumber Daya IKU 3
- 3.10 Realisasi Kinerja IKU 4
- 3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 4
- 3.12 Realisasi Kinerja IKU 5
- 3.13 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 5
- 3.14 Efisiensi Sumber Daya IKU 5
- 3.15 Realisasi Kinerja IKU 6
- 3.16 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 6
- 3.17 Realisasi Kinerja IKU 7
- 3.18 Jenis Layanan Manajemen ASN yang Terdigitalisasi
- 3.19 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 7
- 3.20 Efisiensi Sumber Daya IKU 7
- 3.21 Realisasi Kinerja IKU 8
- 3.22 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 8

- 3.23 Efisiensi Sumber Daya IKU 8
- 3.24 Realisasi Kinerja IKU 9
- 3.25 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 9
- 3.26 Efisiensi Sumber Daya IKU 9
- 3.27 Realisasi Kinerja IKU 10
- 3.28 Pemanfaatan Sistem Informasi di Kanreg IX BKN
- 3.29 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 10
- 3.30 Realisasi Kinerja IKU 11
- 3.31 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 11
- 3.32 Efisiensi Sumber Daya IKU 11
- 3.33 Realisasi Kinerja IKU 12
- 3.34 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 12
- 3.35 Efisiensi Sumber Daya IKU 12
- 3.36 Realisasi Kinerja IKU 13
- 3.37 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 13
- 3.38 Efisiensi Sumber Daya IKU 13
- 3.39 Realisasi Kinerja IKU 14
- 3.40 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 14
- 3.41 Efisiensi Sumber Daya IKU 14

DAFTAR GRAFIK

- 1.1 Data Pegawai Kanreg IX BKN Jayapura
- 3.1 Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian
- 3.2 Perbandingan Nilai IKPA Kantor Regional I - XIV

DAFTAR GAMBAR

- 1.1 Struktur Organisasi Kantor Regional IX BKN Jayapura
- 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023 Kanreg IX BKN Jayapura
- 3.2 Kategori Penilaian Indeks NSPK
- 3.3 Pengukuran IP ASN
- 3.4 Cover dan Link Laporan Survei IKM Pembinaan (Semester I dan II – Tahun 2023)
- 3.5 Cover dan Link Laporan Survei IKM Pelayanan Kepegawaian (Semester I dan II – Tahun 2023)
- 3.6 Integrasi SIASN

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja Kantor Regional IX BKN Tahun 2023 merupakan capaian kinerja Kantor Regional IX BKN selama satu tahun dari bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2023. Penyusunan laporan ini didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja tahun 2023 ini merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Strategis Kantor Regional IX BKN 2020-2024. Dimana tahun 2022 ada 7 Sasaran Strategis dan 14 Indikator Utama pada Kantor Regional IX BKN Jayapura yang mengacu pada Visi Badan Kepegawaian Negara yakni "Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong".

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis Kantor Regional IX BKN Jayapura pada Tahun 2023 sebesar 190,36%, yang diperoleh dari total penjumlahan Nilai Kinerja Perspektif.



Capaian realisasi penyerapan anggaran Kantor Regional IX BKN Jayapura Tahun 2023 sebesar Rp.12.291.299.334,- (97,83%).

Realisasi Anggaran Kanreg IX BKN :



Pagu Anggaran :
12.563.774.000

Realisasi :
12.291.299.334

Sisa Pagu :
272.474.666





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

1.4 SUMBER DAYA

1.5 SARANA DAN PRASARANA

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kantor Regional IX BKN Jayapura di dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Negara di bidang pembinaan dan penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya, yang kewenangannya masih melekat pada pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya, Kantor Regional IX BKN Jayapura dituntut untuk transparan, akuntabel serta efektif dan efisien.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berdaya guna, dan bertanggung jawab, instansi pemerintah diwajibkan untuk menerapkan sistem akuntabilitas kinerja yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Perka BKN Nomor 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengatur secara khusus pelaksanaan SAKIP di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara.

Salah satu komponen penyelenggaraan SAKIP di lingkungan BKN adalah pelaporan kinerja yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada unit kerja atas penggunaan anggaran. Untuk memacu peningkatan kinerja Biro Perencanaan serta sebagai alat untuk menjangking masukan dari pemangku kepentingan, maka dipandang perlu untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerja sebagai pertanggung jawaban kepada setiap pemangku kepentingan.



1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

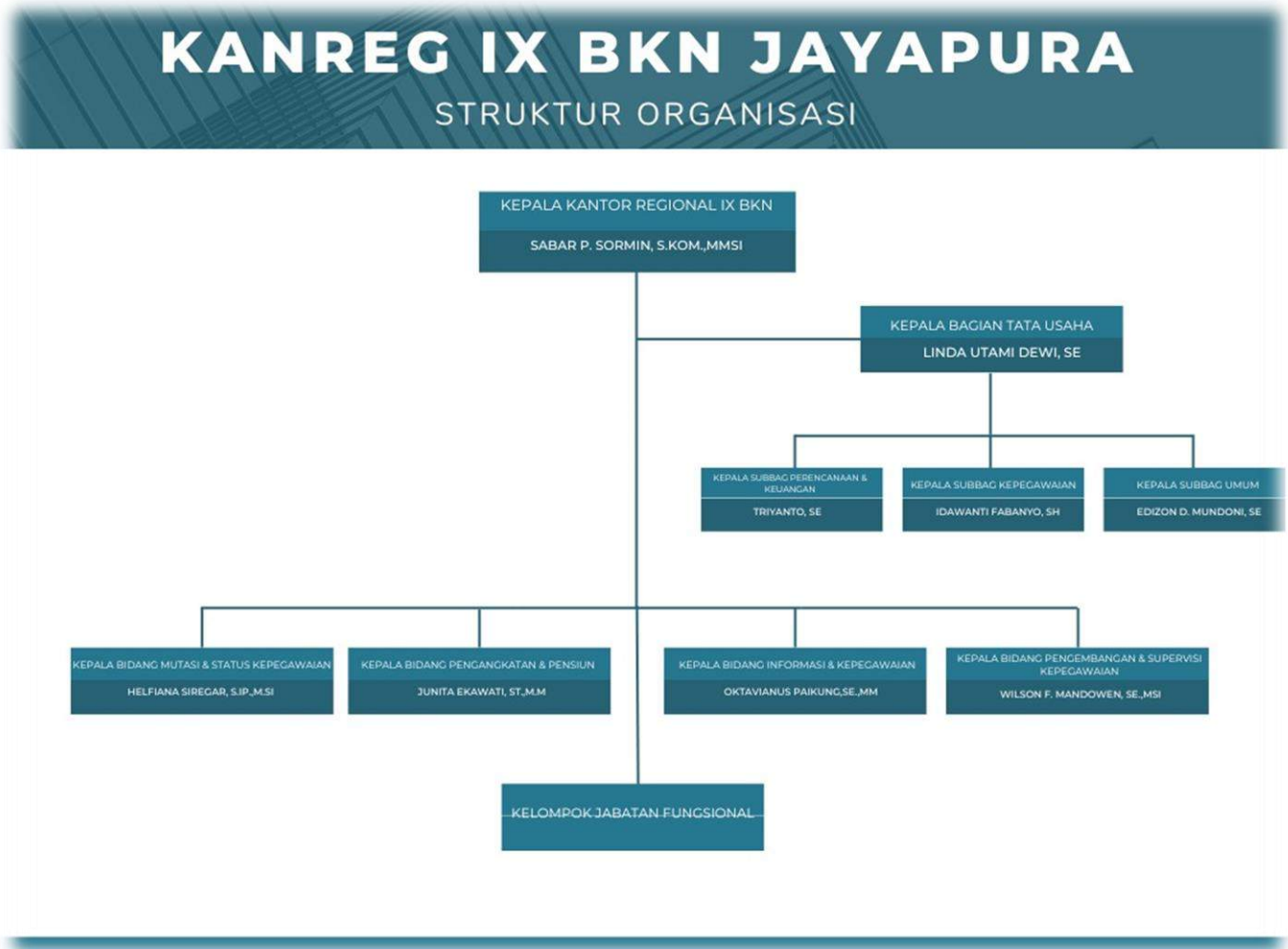
Sesuai Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Negara di bidang pembinaan dan penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya, yang kewenangannya masih melekat pada pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan memiliki fungsi:

- a. Pegawai Negeri Sipil instansi pusat dan instansi daerah di wilayah kerjanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pemberian pertimbangan dan/atau penetapan pengadaan Aparatur Sipil Negara instansi daerah di wilayah kerjanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Penyelenggaraan dan pemeliharaan sistem informasi data kepegawaian Pegawai Negeri Sipil instansi pusat dan instansi daerah di wilayah kerjanya;
- d. Pembinaan, fasilitasi, dan evaluasi penilaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya;
- e. Pengelolaan teknologi informasi penilaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya;
- f. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan implementasi norma, standar, prosedur, dan kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- h. Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura terdiri dari 33 Instansi, yaitu 4 Provinsi, 1 Kota dan 28 Kabupaten.



1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor Regional IX BKN Jayapura



Kantor Regional IX BKN Jayapura berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN Terdiri atas :

1. Kepala memiliki tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi kanreg IX BKN Jayapura di wilayah kerjanya.
2. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan organisasi Kanreg BKN. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana dan program;
 - b. Pengelolaan administrasi keuangan;
 - c. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan reformasi birokrasi internal;
 - d. Pelaksanaan ketatausahaan;
 - e. Pengelolaan barang milik negara dan rumah tangga; dan
 - f. Pelaksanaan dokumentasi dan hubungan masyarakat.

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyusunan rencana, program dan anggaran, penyusunan laporan, pengelolaan administrasi keuangan dan pembayaran, serta pembukuan dan verifikasi.
 - b. Subbagian Kepegawaian dan Pengelolaan Kinerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, administrasi mutasi dan pengembangan kepegawaian, kesejahteraan pegawai, dan fasilitas Reformasi Birokrasi di lingkungan Kanreg BKN.
 - c. Subbagian Umum, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, ekspedisi, pengadaan, perlengkapan, angkutan kendaraan dinas, urusan dalam dan keamanan, pelaksanaan pengelolaan barang milik negara dan pengadaan barang/jasa, serta pelaksanaan dokumentasi dan hubungan masyarakat.
3. Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pemberian pertimbangan teknis kenaikan pangkat dan mutasi lainnya, pertimbangan teknis mutasi antara kabupaten/kota dalam provinsi, pemberian pertimbangan teknis mutasi dari instansi pusat ke instansi daerah, penyiapan pertimbangan status kepegawaian di wilayah kerjanya serta pemberian rekomendasi jaminan kecelakaan kerja dan rekomendasi penetapan tewas di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pemberian persetujuan teknis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah untuk penetapan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Daerah dari Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Utama golongan ruang IV/e;

- b. Pemberian pertimbangan teknis kepada Pejabat Instansi Pusat yang berwenang di daerah untuk penetapan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pusat dari Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;
 - c. Pemberian persetujuan peninjauan masa kerja;
 - d. Penetapan keputusan mutasi Pegawai Negeri Sipil dari instansi pusat ke instansi daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
 - e. Pemberian pertimbangan teknis mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam suatu provinsi;
 - f. Pemberian pertimbangan teknis mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Kabupaten/Kota ke Provinsi di wilayah kerjanya;
 - g. Pemberian pertimbangan teknis mutasi Pegawai Negeri Sipil antara Kabupaten/Kota dalam satu provinsi;
 - h. Penyiapan persetujuan pemberian cuti diluar tanggungan Negara bagi Pegawai Negeri Sipil Instansi pusat dan Instansi daerah samapi dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b di wilayah kerjanya; dan
 - i. Penyiapan pertimbangan status kepegawaian.
4. Bidang Pengangkatan dan Pensiun mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penetapan Nomor Induk Pegawai Pegawai Negeri Sipil, penetapan pertimbangan teknis kenaikan pangkat pengabdian dan / atau pemberian pensiun, pemberian pertimbangan teknis pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya yang telah mencapai batas usia pension Janda/Duda bagi pensiunan yang meninggal dunia yang pensiun janda/dudanya belum ditetapkan dalam keputusan pensiun pegawai, serta melaksanakan pengembangan dan pengelolaan tata naskah pensiun di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengangkatan dan Pensiun menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyiapan penetapan Nomor Induk Pegawai untuk Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil Instansi Daerah di wilayah kerjanya;
 - b. Penyiapan pemberian pertimbangan teknis pensiun Pegawai Negeri Sipil pada instansi pusat yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah yang mencapai batas usia pensiun dan pensiun janda/dudanya yang menjadi kewenangannya;
 - c. Penyiapan pemberian pertimbangan teknis pensiun Pegawai Negeri Sipil pada instansi daerah yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah yang mencapai batas usia pensiun dan pensiun janda/dudanya di wilayah kerjanya;

- d. Penyiapan penetapan pemberian pertimbangan teknis kenaikan pangkat pengabdian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil pada instansi pusat yang menjadi kewenangannya;
 - e. Penyiapan penetapan pemberian pertimbangan teknis kenaikan pangkat pengabdian dan/atau pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil pada instansi daerah di wilayah kerjanya;
 - f. Penyiapan penetapan keputusan pensiun Janda/Duda bagi Pensiunan yang meninggal dunia yang pensiun Janda/Dudannya belum ditetapkan dalam keputusan pensiun pegawai yang menjadi kewenangannya; dan
 - g. Pengembangan dan pengelolaan tata naskah pensiun di wilayah kerjanya.
5. Bidang Informasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan dan memfasilitasi pengembangan sistem informasi kepegawaian dan pengelolaan arsip kepegawaian Aparatur Sipil Negara pada instansi di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Informasi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
- a. Pengelolaan dan pemeliharaan jaringan dan basis data kepegawaian Aparatur Sipil Negara;
 - b. Pengelolaan dan pemeliharaan basis data penilaian kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - c. Pengelolaan dan pemeliharaan data kepegawaian Aparatur Sipil Negara;
 - d. Pelaksanaan pengolahan dan desiminasi informasi kepegawaian Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya;
 - e. Pelaksanaan penyuntingan dan penyajian data kepegawaian;
 - f. Pengelolaan dan pemeliharaan aplikasi sistem layanan kepegawaian Aparatur Sipil Negara;
 - g. Penyelenggaraan penyajian dan pertukaran informasi;
 - h. Pengintegrasian sistem aplikasi kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara dengan unit pengguna di wilayah kerjanya;
 - i. Pelaksanaan fasilitas pengembangan sistem informasi kepegawaian dan sistem informasi kepegawaian;
 - j. Pelaksanaan pengelolaan dan fasilitas pemanfaatan teknologi informasi kepegawaian Aparatur Sipil Negara instansi di wilayah kerjanya;
 - k. Pengelolaan dan pemeliharaan arsip kepegawaian baik dalam bentuk fisik maupun elektronik; dan
 - l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang informasi kepegawaian di wilayah kerjanya.

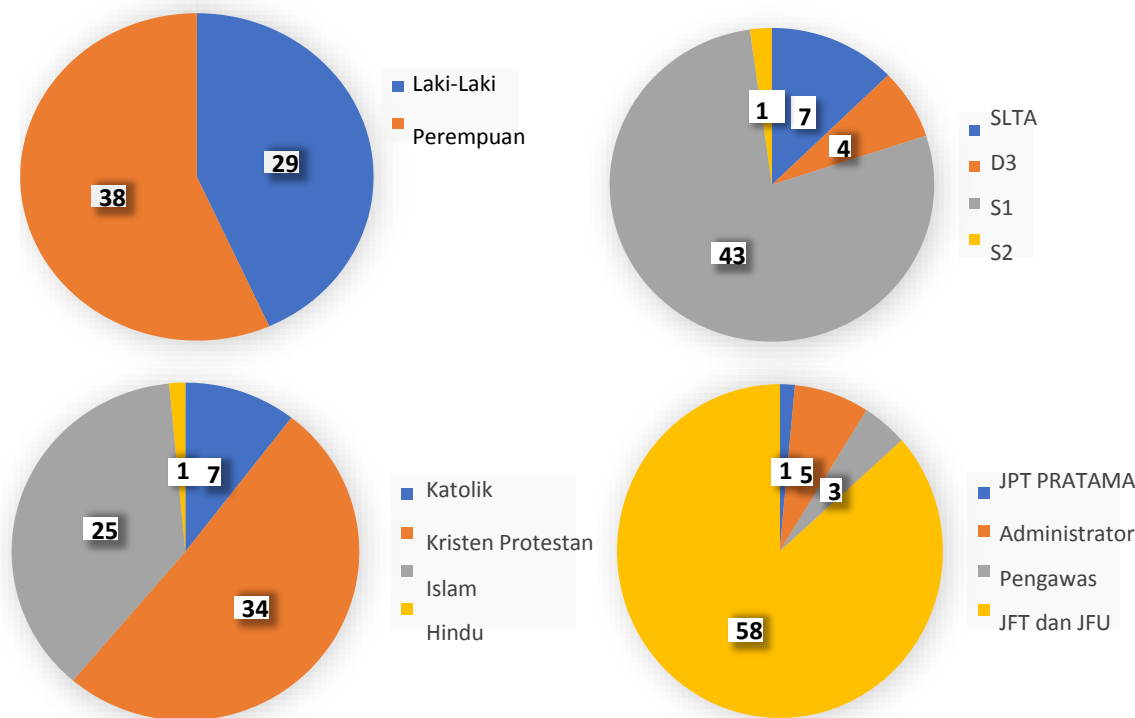
6. Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kepegawaian dan supervisi pelaksanaan Manajemen Aparatur Sipil Negara instansi di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
- a. Pemberian bimbingan dan petunjuk teknis pelaksanaan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
 - b. Penyiapan pengembangan dan pengawasan standar kompetensi jabatan, serta pengendalian pemanfaatan lulusan pendidikan dan pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya;
 - c. Koordinasi pengawasan dan pengendalian norma, standar, prosedur dan kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara dengan aparat pengawasan fungsional bidang kepegawaian;
 - d. Penyiapan bahan dan supervise pelaksanaan kebijakan teknis Manajemen Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya;
 - e. Penyiapan bahan dan pengawasan dan pengendalian NSPK Manajemen Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya;
 - f. Pelaksanaan supervise kinerja dan disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kanreg BKN;
 - g. Pelaksanaan fasilitas pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya;
 - h. Pelaksanaan asistensi pengukuran standar kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - i. Pelaksanaan asistensi pemantauan dan evaluasi penilaian kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - j. Pelaksanaan asistensi pengukuran indeks implementasi norma, standar, prosedur, dan kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi wilayah kerjanya;
 - k. Pelaksanaan fasilitas pengembangan sistem penilaian kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara yang diterapkan pada instansi di wilayah kerjanya;
 - l. Pelaksanaan pemantauan penempatan dalam jabatan di instansi wilayah kerjanya;
 - m. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian internal; dan
 - n. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan supervise kepegawaian.

Di lingkungan Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dapat dibentuk kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

1.4 SUMBER DAYA

Kantor Regional IX BKN Jayapura memiliki Sumber daya manusia sebanyak 68 pegawai, dengan klasifikasi sebagai berikut :

Grafik 1.1 Data Pegawai Kanreg IX BKN Jayapura



1.5 SARANA DAN PRASARANA

Kantor Regional IX BKN Jayapura memiliki 2 (dua) buah gedung yaitu gedung kantor utama dan gedung tata naskah yang terletak di jalan Baru Kotaraja No. 100/B Kotaraja, Abepura, Jayapura Papua dengan luas gedung sebesar 8.249 m². Untuk menunjang operasional kantor, Kantor Regional memiliki kendaraan roda empat berupa mobil sebanyak 5 (lima) unit, dan kendaraan roda dua sebanyak 2 (dua) unit.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kantor Regional IX BKN Jayapura, memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

- | | |
|----------------|--|
| BAB I | : PENDAHULUAN |
| | Meliputi penjelasan umum unit kerja, aspek strategis serta penjelasan Tugas Pokok dan Fungsi |
| BAB II | : PERENCANAAN KINERJA |
| | Meliputi Perencanaan Strategis dan Perjanjian Kinerja |
| BAB III | : AKUNTABILITAS KINERJA |
| | Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan |
| BAB IV | : PENUTUP |

BAB II

PERENCANAAN KINERJA



2.1 VISI DAN MISI

2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.3 PERJANJIAN KINERJA

2.4 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya suatu tugas pokok dan fungsi. Dalam rangka mengemban amanah mandat Undang-undang, Visi BKN Tahun 2022-2024 adalah melaksanakan Visi Presiden Nomor 8 yaitu “Pengelolaan Pemerintah yang Bersih Efektif dan Terpercaya” dengan melaksanakan arahan Presiden Nomor 4 yaitu “Penyederhanaan Birokrasi” dan Agenda Pembangunan nomor 7 yaitu “Memperkuat Stabilitas Pilhukam dan Transformasi Pelayanan Publik” dengan ***“Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk Mendukung Tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royang”***.

Dalam mendukung tercapainya Visi yang telah ditetapkan, terdapat 5 pilar yang menjadi misi Badan Kepegawaian Negara yakni meningkatkan kualitas ASN melalui :

1. Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN;
2. Penyelenggaraan Manajemen ASN;
3. Penyimpanan Informasi Pegawai ASN;
4. Pengawasan dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN; dan
5. Mengembangkan dan Mengoptimalkan Sistem Manajemen Internal BKN.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi Badan Kepegawaian Negara. Adapun tujuan yang hendak dicapai Kantor Regional IX BKN Jayapura adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pembinaan dan Penyelenggaraan Manajemen ASN yang Berkualitas di Wilayah Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara Jayapura;
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Manajemen ASN yang Berkualitas Prima di Wilayah Kantor Regional IX BKN Jayapura;
3. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Database dan Sistem Informasi ASN di Wilayah Kantor Regional IX BKN Jayapura;
4. Mewujudkan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN di Wilayah Kantor Regional IX BKN Jayapura; dan

5. Mewujudkan Tata Kelola Manajemen ASN BKN yang efektif, efisien, dan akuntabel di Wilayah Kantor Regional IX BKN Jayapura.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Kantor Regional IX BKN Jayapura adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Profesional dalam menerapkan Manajemen ASN, memiliki Indikator Kinerja:
 - a. Persentase Instansi Pemerintah yang telah mengimplementasikan Manajemen ASN sesuai NSPK (minimal bernilai A dan B) di Wilayah Kantor Regional IX BKN;
 - b. Persentase Instansi Pemerintah yang melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di Kantor Regional IX BKN Jayapura.
2. Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima di Kantor Regional IX BKN, memiliki Indikator Kinerja:
 - a. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang diselenggarakan di Kantor Regional IX BKN Jayapura;
 - b. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kepegawaian yang diselenggarakan di Kantor Regional IX BKN Jayapura.
3. Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN, memiliki Indikator Kinerja:
 - a. Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis dan Instrumen Manajemen ASN di Kantor Regional IX BKN Jayapura.
4. Terwujudnya peningkatan kualitas data dan sistem Informasi ASN, memiliki Indikator Kinerja:
 - a. Persentase Sistem Informasi Kepegawaian Pengelola ASN yang Terintegrasi dengan SI ASN di Kantor Regional IX BKN Jayapura.
5. Terwujudnya peningkatan digitalisasi penyelenggaraan layanan manajemen ASN, memiliki Indikator Kinerja:
 - a. Persentase Layanan Manajemen ASN yang Berbasis Digital di Kantor Regional IX BKN Jayapura.
6. Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen ASN, memiliki Indikator Kinerja:
 - a. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian yang Ditindaklanjuti di Kantor Regional IX BKN Jayapura.
7. Terwujudnya manajemen internal BKN yang efektif, efisien, dan akuntabel, memiliki Indikator Kinerja:
 - a. Indeks Profesionalitas ASN BKN Kanreg IX BKN Jayapura;

- b. Persentase pemanfaatan Sistem Informasi yang terstandar di Kantor Regional IX BKN Jayapura;
- c. Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kantor Regional IX BKN Jayapura;
- d. Skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja di Kantor Regional IX BKN Jayapura;
- e. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Regional IX BKN Jayapura;
- f. Persentase Tindak lanjut Temuan Hasil Audit Pemeriksaan BPK/ Inspektorat di Kantor Regional IX BKN Jayapura.

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Kinerja atau Perjanjian Kinerja ditetapkan untuk dijadikan sebagai tolak ukur pengukuran capaian kinerja. Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara Jayapura menyusun Penetapan Kinerja Tahun 2023 berdasarkan hasil pembahasan dengan seluruh unit kerja di lingkungan Kantor Regional IX BKN Jayapura.

Tabel 2.1 Penetapan Perjanjian Kinerja Kanreg IX BKN Jayapura Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Stakeholder Perspective			
1	Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Profesional dalam menerapkan Manajemen ASN	Persentase Instansi Pemerintah yang telah mengimplementasikan Manajemen ASN sesuai NSPK (minimal bernilai A dan B) di Wilayah Kantor Regional IX BKN	20
		Persentase Instansi Pemerintah yang melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di Kantor Regional IX BKN Jayapura	100
Customer Perspective			
2	Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima di Kantor Regional IX BKN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang diselenggarakan di Kantor Regional IX BKN Jayapura	96
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kepegawaian yang diselenggarakan di Kantor Regional IX BKN Jayapura	96
Internal Perspective			

3	Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN	Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis dan Instrumen Manajemen ASN di Kantor Regional IX BKN Jayapura	100
4	Terwujudnya peningkatan kualitas data dan sistem Informasi ASN	Persentase Sistem Informasi Kepegawaian Pengelola ASN yang Terintegrasi dengan SI ASN di Kantor Regional IX BKN Jayapura	95
5	Terwujudnya peningkatan digitalisasi penyelenggaraan layanan manajemen ASN	Persentase Layanan Manajemen ASN yang Berbasis Digital di Kantor Regional IX BKN Jayapura	100
6	Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen ASN	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian yang Ditindaklanjuti di Kantor Regional IX BKN Jayapura	95

Learn and Growth Perspective

7	Terwujudnya manajemen Internal BKN yang efektif, efisien, dan akuntabel	Indeks Profesionalitas ASN BKN Kanreg IX BKN Jayapura	80
		Persentase pemanfaatan Sistem Informasi yang terstandar di Kantor Regional IX BKN Jayapura	100
		Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kantor Regional IX BKN Jayapura	83
		Skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja di Kantor Regional IX BKN Jayapura	80
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Regional IX BKN Jayapura	93
		Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit / Pemeriksaan / BPK / Inspektorat BKN di Kantor Regional IX BKN	100

Tabel 2.2 Perbandingan Target Pk 2023 Kanreg IX BKN Jayapura

SASARAN STRATEGIS		IKU		TERGET PK 2023	TARGET 2023 RENSTRA	KET
STAKEHOLDER PERSPECTIVE						
1	Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Profesional dalam menerapkan Manajemen ASN	1	Persentase Instansi Pemerintah yang telah mengimplementasikan Manajemen ASN sesuai NSPK (minimal bernilai A dan B) di Wilayah Kantor Regional IX BKN	20	40	{Target PK lebih Rendah dibandingkan Target Renstra)
		2	Persentase Instansi Pemerintah yang melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di Kantor Regional IX BKN Jayapura	100	100	SELARAS
CUSTOMER PERSPECTIVE						
2	Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima di Kantor Regional IX BKN	3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang diselenggarakan di Kantor Regional IX BKN Jayapura	96	95	SELARAS
		4	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kepegawaian yang diselenggarakan di Kantor Regional IX BKN Jayapura	96	95	SELARAS
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE						
3	Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN	5	Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis dan Instrumen Manajemen ASN di Kantor Regional IX BKN Jayapura	100	100	SELARAS
4	Terwujudnya peningkatan kualitas data dan sistem Informasi ASN	6	Persentase Sistem Informasi Kepegawaian Pengelola ASN yang Terintegrasi dengan SI ASN di Kantor Regional IX BKN Jayapura	95	95	SELARAS

5	Terwujudnya peningkatan digitalisasi penyelenggaraan layanan manajemen ASN	7	Persentase Layanan Manajemen ASN yang Berbasis Digital di Kantor Regional IX BKN Jayapura	100	100	SELARAS
6	Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen ASN	8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian yang Ditindaklanjuti di Kantor Regional IX BKN Jayapura	95	95	SELARAS

LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE

7	Terwujudnya manajemen internal BKN yang efektif, efisien, dan akuntabel	9	Indeks Profesionalitas ASN BKN Kanreg IX BKN Jayapura	80	80	SELARAS
		10	Persentase pemanfaatan Sistem Informasi yang terstandar di Kantor Regional IX BKN Jayapura	100	100	SELARAS
		11	Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kantor Regional IX BKN Jayapura	83	83	SELARAS
		12	Skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja di Kantor Regional IX BKN Jayapura	80	80	SELARAS
		13	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Regional IX BKN Jayapura	93	93	SELARAS
		14	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit / Pemeriksaan / BPK / Inspektorat BKN di Kantor Regional IX BKN	100	100	SELARAS

2.4 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Kantor Regional IX BKN Jayapura telah menyusun Perjanjian Kinerja yang dijadikan dasar penilaian keberhasilan maupun kegagalan dalam upaya mencapai target kinerja dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara. Perjanjian Kinerja ini disusun dengan mengacu pada Sasaran Strategis Sekretariat Utama dan IKU yang diperjanjikan. Dalam pelaksanaan Perjanjian Kinerja ini Kantor Regional IX BKN Jayapura diberikan alokasi dana sebesar Rp. 11.584.149.000,- (Sebelas Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dari pagu awal tersebut terdapat 13 kali revisi anggaran dikarenakan adanya pemblokiran anggaran, pengalihan anggaran antar program, antar kegiatan dan adanya penambahan anggaran terkait pelaksanaan Seleksi CASN Tahun 2023 sehingga pagu anggaran terakhir menjadi Rp.12.563.774.000,- (Dua Belas Miliar Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah). Dari pagu anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 2 Program dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3 Pagu Anggaran Kanreg IX BKN Jayapura Tahun 2023

KODE	URAIAN PROGRAM	PAGU ANGGARAN
CO	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	2.768.340.000
WA	Program Dukungan Manajemen	9.795.434.000



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

3.2 Realisasi Anggaran

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

Kantor Regional IX BKN Jayapura merupakan salah satu unit kerja yang memiliki peran penting dan strategis dalam mendukung pencapaian target kinerja Badan Kepegawaian Negara. Hal tersebut dapat dilihat dari dukungan Kanreg IX BKN Jayapura terhadap capaian target kinerja yang telah ditetapkan Badan Kepegawaian Negara Tahun 2023 yang mencerminkan keberhasilan kinerja Kanreg IX BKN Jayapura. Tercermin dari output yang telah dicapai selama satu tahun periode, dengan merujuk pada data dukung baik berupa laporan maupun data dukung lainnya yang dapat mendongkrak keberhasilan output maupun kinerja.

Tahun 2023 Kantor Regional IX BKN mendapat Nilai Pencapaian Sasaran Strategis sebesar 94,57% Berikut Nilai Pencapaian Sasaran Strategis yang didapat dari perhitungan realisasi per Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Tahun 2023:

Gambar 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023 Kanreg IX BKN Jayapura

NPSS: 94.57										
Rencana Strategis / Indikator Kinerja Utama		Target Tahun an	Realisasi	%	Status	NSR	Status NSR	Skor SR	NKP	Status NKP
Stakeholder Perspective								95.45	23.86	
SS.1. Terwujudnya instansi pemerintah yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN						95.45				
IKU 1.	Persentase Instansi Pemerintah yang telah mengimplementasikan Manajemen ASN sesuai NSPK (minimal bernilai A dan B) di Wilayah Kantor Regional IX BKN	20%	18%	90.90%						
IKU 2.	Persentase Instansi Pemerintah yang melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di Kantor Regional IX BKN Jayapura	100%	100%	100.00%						
Customer Perspective								85.42	21.35	
SS.2. Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawalan yang berkualitas prima						85.42				
IKU 3.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang diselenggarakan di Kantor Regional IX BKN Jayapura	96	82	85.42%						
IKU 4.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kepegawalan yang diselenggarakan di Kantor Regional IX BKN Jayapura	96	82	85.42%						
Internal Process Perspective								100.55	25.14	
SS.3. Terwujudnya Pemenuhan Kebijakan Teknis Manajemen ASN						100.00				
IKU 5.	Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis dan Instrumen Manajemen ASN di Kantor Regional IX BKN Jayapura	100%	100%	100.00%						
SS.4. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Data dan Sistem Informasi ASN						105.26				
IKU 6.	Persentase Sistem Informasi Kepegawalan Pengelola ASN yang Terintegrasi dengan SI ASN di Kantor Regional IX BKN Jayapura	95%	100%	105.26%						
SS.5. Terwujudnya Peningkatan Digitalisasi Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN						91.67				
IKU 7.	Persentase Layanan Manajemen ASN yang Berbasis Digital di Kantor Regional IX BKN Jayapura	100%	92%	91.67%						
SS.6. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Manajemen ASN						105.26				
IKU 8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian Kepegawalan yang Ditindaklanjuti di Kantor Regional IX BKN Jayapura	95%	100%	105.26%						
Learn and Growth Perspective								96.88	24.22	
SS.7. Terwujudnya Manajemen Internal BKN yang efektif, efisien dan akuntabel						96.88				
IKU 9.	Indeks Profesionalitas ASN BKN Kanreg IX BKN Jayapura	80	83.14	103.93%						
IKU 10.	Persentase pemanfaatan Sistem Informasi yang tersetandar di Kantor Regional IX BKN Jayapura	100%	100%	100.00%						
IKU 11.	Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kantor Regional IX BKN Jayapura	83	78.57	94.66%						
IKU 12.	Skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja di Kantor Regional IX BKN Jayapura	80	65	81.25%						
IKU 13.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Regional IX BKN Jayapura	93	93.86	100.92%						

SASARAN I

TERWUJUDNYA INSTANSI PEMERINTAH YANG PROFESIONAL DALAM MENERAPKAN MANAJEMEN ASN

IKU 1 Persentase Instansi Pemerintah yang Telah Menyelenggarakan Tata Kelola Manajemen ASN Sesuai NSPK di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN

Terwujudnya Instansi pemerintah di wilayah kerja Kantor Regional IX BKN yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN bermakna bahwa diharapkan instansi pemerintah mampu menerapkan manajemen ASN yang profesional sesuai dengan peraturan/Norma Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK). Penilaian indeks NSPK ini diolah oleh tim penilai dari Kanreg dan Pusat BKN dengan mempertimbangkan elemen-elemen NSPK sebagai berikut :

• Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan ASN • Pengadaan ASN • Pengangkatan ASN • Pangkat • Mutasi • Jabatan • Pengembangan Karier ASN • Pola Karier • Penggajian, Tunjangan, dan Fasilitas	• Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan ASN • Pengadaan ASN • Pengangkatan ASN • Pangkat • Mutasi • Jabatan • Pengembangan Karier ASN • Pola Karier • Penggajian, Tunjangan, dan Fasilitas
---	---

Formula yang digunakan untuk pengukuran pada IKU ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah instansi yang mendapatkan nilai A dan B pada penilaian indeks implementasi NSPK manajemen ASN jumlah instansi}}{\text{Jumlah instansi pemerintah di wilayah kerja Kantor Regional IX BKN}} \times 100\%$$

Gambar 3.2 Kategori Penilaian Indeks NSPK



Tabel 3.1 Realisasi Kinerja IKU 1

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
IKU 1 Persentase Instansi Pemerintah yang Telah Menyelenggarakan Tata Kelola Manajemen ASN Sesuai NSPK di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN	20%	18,18%	90,90%

Persentase Instansi Pemerintah yang Telah Menyelenggarakan Tata Kelola Manajemen ASN Sesuai NSPK di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN pada tahun 2023 mengacu pada nilai yang dikeluarkan oleh Kedeputusan Wasdal. Persentase Instansi Pemerintah yang telah menyelenggarakan Tata kelola Manajemen ASN sesuai Standar Tata Kelola Manajemen ASN Diwilayah Kanreg IX BKN Jayapura belum mendapatkan nilai dikarenakan masih dalam tahap penilaian oleh Kedeputusan Wasdal BKN Pusat.

Sebagai bahan pertimbangan atas pengukuran dan evaluasi terhadap target dan realisasi Renstra 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 1

IKU	2020		2021		2022		2023		2024
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target PK
IKU 1	5%	10%	10%	10%	40%	3.33%	20%	18,18%	40%

Capaian Indeks NSPK belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan masih menunggu penilaian dari Kedeputian Wasdal BKN Pusat. Upaya yang dilakukan Kantor Regional IX BKN Jayapura guna meningkatkan Persentase Instansi Pemerintah yang telah menyelenggarakan tata kelola Manajemen ASN dengan dilaksanakannya pendampingan baik secara daring, kegiatan Penyelesaian Permasalahan Kepegawaian yang dilakukan di Wilayah Kerja Kanreg IX BKN, dan Workshop Percepatan Pelayanan yang diselenggarakan di aula Kanreg IX pada bulan Agustus.



Efisiensi Sumber Daya pada pelaksanaan IKU 1 yaitu :

$$\text{Efisiensi} = \frac{(\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}) - \text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}} \times 100\%$$

Tabel 3.3 Efisiensi Sumber Daya IKU 1

IKU	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi
IKU 1	20	N/A	N/A	-	-	-

Capaian Indeks NSPK belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan masih menunggu penilaian dari Kedeputian Wasdal BKN Pusat. Upaya yang dilakukan Kantor Regional IX BKN Jayapura guna meningkatkan Persentase Instansi Pemerintah yang telah menyelenggarakan tata kelola Manajemen ASN dengan dilaksanakannya pendampingan baik secara daring, kegiatan Penyelesaian Permasalahan Kepegawaian yang dilakukan di Wilayah Kerja Kanreg IX BKN, dan [Workshop Percepatan Pelayanan](#) (QR Materi terlampir) yang diselenggarakan di aula Kanreg IX pada bulan Agustus.



Kendala yang dihadapi :

- Instansi mengalami kesulitan mengumpulkan eviden karena tidak semua eviden dapat diperoleh dari instansi pengelola kepegawaian.
- Bidang PDSK selaku pengampu Indikator Kinerja tidak dapat memantau progress pengisian oleh Daerah secara rinci per butir eviden yang diinput pada aplikasi pengukuran Indeks NSPK MASN.
- Informasi Login (Username dan Password) yang berbeda dengan user SIASN (Non SSO) sehingga pengelola kepegawaian sering kehilangan aksesnya.
- Progress pengukuran Indeks NSPK berbasis eviden dengan bentuk yang beragam, dipengaruhi oleh perbedaan aturan persuratan dan tata naskah dinas masing-masing Instansi dimana secara nasional harusnya sudah mengacu pada PERMENDAGRI No.1 Tahun 2023 dan ketentuan lainnya.

Rencana Tindak Lanjut :

- Percepatan proses penginputan dan peningkatan capaian pengisian aplikasi penilaian Indeks NSPK MASN dengan pendekatan kerja tim yang dipimpin oleh person in charge per wilayah kerja dan telah ditetapkannya PIC secara nasional oleh Kedeputusan WASDAL BKN Pusat.
- Saran agar Informasi Login (Username dan Password) menggunakan sistem Single Sign On (SSO) serupa dengan sistem pada SIASN.
- Pengusulan pengintegrasian sistem penilaian yang lebih akuntabel dengan mempertimbangkan output layanan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Regional BKN (Contohnya, Persentase usulan berkas yang berstatus MS, Respon daerah terhadap implementasi kebijakan bidang Kepegawaian dan sebagainya)
- Permohonan penerbitan dashboard NSPK Nasional yang dapat diakses oleh setiap PPK sebagai standar kontrol capaian progress per periodik yang dapat diakses semua pihak terkait .



Keterangan QR :

Eviden Pembentukan Tim Person In Charge
Pengukuran Indeks NSPK MASN
Tingkat Regional dan Kantor Pusat BKN,
Hasil Pengukuran Terakhir (2023)
& Instrumen Pendampingan.

IKU 2 Persentase Instansi Pemerintah yang Melakukan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN

Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Profesional dalam menerapkan Manajemen ASN bermakna bahwa ASN yang ada di wilayah kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura diharapkan memiliki kompetensi tinggi, professional dalam bekerja serta juga memiliki integritas dalam menjalankan tugasnya. Indikator bertujuan untuk mengukur Persentase Instansi Pemerintah yang Melakukan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN tercapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Dari jumlah instansi yang telah melakukan penginputan pada aplikasi IP-JASN. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan Kesesuaian sebagai berikut :

Gambar 3.3 Pengukuran IP ASN



Formula yang digunakan untuk pengukuran pada IKU ini adalah sebagai berikut :

Realisasi= $\frac{\text{Jumlah instansi pemerintah yang melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN} \times 100}{\text{Jumlah instansi pemerintah di wilayah kerja Kantor Regional IX BKN}}$

Tabel 3.4 Realisasi Kinerja IKU 2

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
IKU 2 Persentase Instansi Pemerintah yang Melakukan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN	100%	100%	100%

Persentase Instansi Pemerintah yang melakukan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN pada tahun 2023 sesuai dengan target yaitu 100%.

Sebagai bahan pertimbangan atas pengukuran dan evaluasi terhadap target dan realisasi Renstra 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 2

IKU	2020		2021		2022		2023		2024
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target PK
IKU 2	30%	35%	30%	30%	100%	100%	100%	100%	100%

Capaian Indeks Profesionalitas ASN tahun 2023 sama dengan tahun sebelumnya yaitu 100% via SIASN BKN hal ini menunjukkan bahwa Instansi yang berada di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN telah melaksanakan Pengukuran IP ASN. Upaya yang dilakukan Kantor Regional IX BKN Jayapura dalam meningkatkan IP ASN di wilayah kerja Kantor Regional IX yaitu dengan dilakukannya sosialisasi maupun pendampingan kepada daerah dengan kegiatan Workshop Percepatan Pelayanan. Kantor Regional IX BKN Jayapura ikut mendorong terbangunnya budaya peduli data kepegawaian kepada setiap ASN di wilayah kerja pada setiap kesempatan.



Efisiensi Sumber Daya pada pelaksanaan IKU 2 yaitu :

$$\text{Efisiensi} = \frac{(\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}) - \text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}} \times 100\%$$

Tabel 3.5 Efisiensi Sumber Daya IKU 2

IKU	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi
IKU 2	100	100	100	-	-	-

Kendala yang dihadapi :

- Pada instansi pemerintah daerah belum dibentuk tim kerja yang menangani pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.
- Proses peremajaan data pegawai pada instansi daerah di wilayah kerja masih terfokus pada pemenuhan kewajiban administrasi dalam pemberian layanan kepegawaian.
- Terindikasi tidak bejalannya tugas dan fungsi unit kerja yang membidangi peremajaan data informasi kepegawaian pada instansi pengelola kepegawaian.
- Belum adanya perencanaan karier maupun proses identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi pada instansi pemerintah daerah.
- Tidak adanya respon daerah ditengarai kurangnya pengawasan pada unsur pengelolaan data dan informasi kepegawaian ASN.

Rencana Tindak Lanjut :

- Penyampaian pemberitahuan secara berkala kepada Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai bahan perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian ASN di daerah pada forum pembinaan dan surat resmi (Tertulis dan Lisan).
- Penyusunan pedoman teknis sebagai referensi instansi pengelola kepegawaian di daerah.
- Mendorong progress peremajaan data pegawai agar berjalan kepada pengelola kepegawaian dan membangun kesadaran para ASN tentang pentingnya akses dan kepemilikan data kepegawaiannya masing-masing agar senantiasa dipantau melalui akses MYASN masing-masing.
- Mengusulkan percepatan penyempurnaan SIASN sehingga memperkecil peluang penyalahgunaan data informasi kepegawaian.



Keterangan QR :
Eviden Pemberitahuan Hasil IPASN 2022
Kebijakan Peningkatan IPASN Tahun 2023
&
Permohonan Akses Fitur Monitor IPASN.

SASARAN II

TERWUJUDNYA PEMBINAAN DAN PELAYANAN KEPEGAWAIAN YANG BERKUALITAS PRIMA

IKU 3 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang Diselenggarakan Kantor Regional IX BKN

Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembinaan manajemen ASN yang diselenggarakan oleh Kantor Regional IX BKN Jayapura (bidang PDSK). Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pembinaan Manajemen ASN diperoleh melalui pengisian survey oleh Instansi di wilayah kerja Kantor Regional IX BKN dalam bentuk kuisioner.

Gambar 3.4 Survei IKM Pembinaan



**QR Laporan SKM
Pembinaan Manajemen
ASN Tahun 2023**

Formula yang digunakan untuk Pengukuran pada IKU 3 ini sebagai berikut :
Formula

$$IKM = SKM \times 25$$

Dimana:

IKM = Indeks kepuasan masyarakat

SKM = $\frac{\text{Total dari nilai persensi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}}$ x nilai penimbang

Nilai penimbang = $\frac{\text{jumlah bobot}}{\text{Jumlah Unsur Penilaian}}$, jumlah bobot = 1

Tabel 3.6 Realisasi Kinerja IKU 3

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
IKU 3 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang Diselenggarakan Kantor Regional IX BKN	96	82	85,42

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang Diselenggarakan Kantor Regional IX BKN mempunyai target sebesar 96, realisasi pada semester I (Bulan Januari s/d Juni tahun 2023) sebesar 80,12 poin dan semester II (Bulan Juli s/d Desember 2023) sebesar 85 poin. Dengan demikian capaian sebesar 82,57 untuk di Tahun 2023 belum memenuhi target. Sebagai bahan pertimbangan atas pengukuran dan evaluasi terhadap target dan realisasi Renstra 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 3

IKU	2020		2021		2022		2023		2024
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target PK
IKU 3	80	80	80	85	95	91	96	82	96

Telah terjadi penurunan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pembinaan manajemen ASN dari tahun sebelumnya (2022) dengan hasil analisis sebagai berikut.

ASPEK	Semester I	Semester II	Kesimpulan
Kelebihan	Pendampingan E-Kinerja harus lebih implikatif sesuai dengan lingkup Pemerintah Daerah.	Materi pembinaan dinilai sangat aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan (Peserta Kegiatan).	Menurunnya perolehan IKM Pembinaan diakibatkan oleh beberapa faktor diantaranya (1) Teknis Pelaksanaan kegiatan yang oleh penyelenggara terkesan tidak siap dari segi waktu maupun kelengkapan yang harus disiapkan peserta (Contohnya: Ketidak tersedianya akses MYASN pegawai yang ingin melakukan praktek pengisian SKP pada saat pembinaan teknis pengisian Aplikasi E-Kinerja BKN), (2) Penggunaan sampling data responden yang terbatas dari satu unit kerja saja (Bidang PDSK), (3) Kesenjangan / gap pengetahuan ASN tentang manajemen kepegawaian hanya sebatas administrasi layanan seperti kenaikan pangkat, mutasi, promosi dan pemberhentian dan (4) Penyediaan informasi sediaan setiap saat yang hanya
Kekurangan	Teknis pelaksanaan kegiatan seperti waktu dan tempat perlu dipertimbangkan secara matang oleh penyelenggara agar hasilnya optimal dirasakan.	Peserta belum memahami aspek hak dan kewajiban seorang ASN karena belum adanya penetapan sanksi / reward pada unit kerja.	
Peluang	Kedudukan BKN sebagai instansi yang bertanggungjawab membina dan memberikan pelayanan manajemen kepegawaian ASN.		
Ancaman	Keterlibatan BKN dalam mengeksekusi kebijakan khusus di Papua seringkali salah dimaknai oleh penerima layanan.	Pengguna layanan BKN (ASN) di Papua belum sepenuhnya terliterasi secara digital dan mengetahui tentang pentingnya penggunaan MYASN sebagai	

ASPEK	Semester I	Semester II	Kesimpulan
		mekanisme kontrol layanan.	kantor pusat tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan kekurangan daerah.

Kendala yang dihadapi :

- Survei pembinaan selama ini hanya didistribusikan oleh satu unit kerja di Kantor Regional IX BKN Jayapura, sehingga jumlah responden hanya mewakili layanan pembinaan oleh salah satu unit kerja tersebut.
- Belum dipahaminya kegunaan survei IKM Pembinaan sebagai instrumen untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan pembinaan dan penggambaran kebutuhan instansi di wilayah kerja terhadap jenis kegiatan pembinaan manajemen ASN.
- Program prioritas penyelesaian permasalahan kepegawaian belum menyasar pengisian Survei Pembinaan Manajemen ASN sebagai mekanisme kontrol layanan pembinaan.

Rencana Tindak Lanjut :

- Menetapkan nota dinas mempertegas kewajiban pegawai kantor Regional IX BKN Jayapura untuk menyerahkan survei pembinaan selepas pelaksanaan kegiatan terkait pembinaan.
- Menjadikan instrument IKM Pembinaan sebagai kelengkapan yang wajib dibawa setiap pegawai dan dibagikan kepada pengguna layanan pada program penyelesaian permasalahan kepegawaian yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) berkala di tahun 2024,
- Pemberian reward kepada responden berupa gift e-book terkait manajemen ASN.
- Pemutakhiran Instrumen pelaksanaan survei di tahun 2024.



Keterangan QR :
 Link Survei Kepuasan
 Pembinaan Manajemen Kepegawaian
 ASN Tahun 2024

Efisiensi Sumber Daya pada pelaksanaan IKU 3 yaitu :

$$\text{Efisiensi} = \frac{(\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}) - \text{Realisasi Anggaran} \times 100 \%}{\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}}$$

Tabel 3.8 Efisiensi Sumber Daya IKU 3

IKU	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi
IKU 3	96	82	85,42	-	-	-

IKU 4 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kepegawaian yang Diselenggarakan Kantor Regional IX BKN

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui seberapa puas masyarakat terhadap Layanan Kepegawaian yang diselenggarakan oleh Kantor Regional IX BKN Jayapura. Ukuran yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kepegawaian yang dilaksanakan oleh Kantor Regional IX BKN Jayapura melalui beberapa unit kerja, diantaranya :

- Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian;
- Bidang Pengangkatan dan Pensiun ;
- Bidang Informasi Kepegawaian ;
- Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian.

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kepegawaian diperoleh melalui pengisian survey oleh Instansi di wilayah kerja Kantor Regional IX BKN dalam bentuk kuisioner.



Formulir survei dapat diakses secara online (Scan QR Code) melalui link berikut.

<https://s.id/IKMKanreg9BKN2023>

Gambar 3.5 Cover dan Link Laporan Survei IKM Pelayanan Kepegawaian (Semester I dan II – Tahun 2023)



QR Laporan SKM
Pelayanan Manajemen
ASN Tahun 2023



QR Surat Pemberitahuan
Pelaksanaan Survei
Pelayanan MASN 2023

Formula yang digunakan untuk Pengukuran pada IKU 4 ini sebagai berikut :

Formula:

Realisasi = rata - rata IKM di 4 unit pengampu

$$IKM = SKM \times 25$$

Dimana:

IKM = Indeks kepuasan masyarakat

$$SKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$$

$$\text{Nilai penimbang} = \frac{\text{jumlah bobot}}{\text{jumlah unsur penilaian}} \quad \text{jumlah bobot} = 1$$

Tabel 3.9 Realisasi Kinerja IKU 4

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
IKU 4 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kepegawaian yang Diselenggarakan Kantor Regional IX BKN	96	82	85,42

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kepegawaian yang Diselenggarakan Kantor Regional IX BKN mempunyai target sebesar 96, realisasi pada semester I (Bulan Januari s/d Juni tahun 2023) sebesar 81,48 poin dan semester II (Bulan Juli s/d Desember 2023) sebesar 81,27 poin. Dengan demikian capaian sebesar 81,38 untuk di Tahun 2023 belum memenuhi target. Sebagai bahan pertimbangan atas pengukuran dan evaluasi terhadap target dan realisasi Renstra 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 4

IKU	2020		2021		2022		2023		2024
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target PK
IKU 4	80	85	80	85	95	91	96	82	96

- Telah terjadi penurunan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kepegawaian dari tahun sebelumnya (2022) dengan hasil analisis sebagai berikut.

UNSUR	Semester I dan II	Kesimpulan
Unsur Terendah	Unsur 1 (Persyaratan Pelayanan Teknis dan Administrasi yang dapat dipahami dan dilengkapi)	Berdasarkan tren hasil penilaian SKM Pelayanan Kanreg IX BKN Jayapura tahun 2023 menunjukkan adanya gap kemampuan daerah / instansi
Unsur Tertinggi	Unsur 4 (Efisiensi dan Kepraktisan Layanan)	

UNSUR	Semester I dan II	Kesimpulan
Kendala	(1.) Pemangku kepentingan secara luas tidak memahami digitalisasi yang telah dilakukan oleh BKN karena berbagai kendala dalam proses diseminasi informasi di daerah (Hasil evaluasi pelaksanaan BIMTEK). (2.) Kelengkapan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan manajemen ASN tidak dipahami oleh pemangku kepentingan di bidang pemerintahan (Minimnya eviden Indeks NSPK MASN). (3.) Penerima layanan mengalami kebingungan atau kesulitan untuk mengakses portal helpdesk atau konsultasi kepegawaian (Hasil evaluasi pengaduan). (4.) Masih terbatasnya fitur yang disediakan pada HelpDesk Si-ASN untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna layanan (Hasil evaluasi BIMTEK) dan (5.) Kendala force majeure lainnya seperti budaya organisasi dan keterbatasan aksesibilitas jaringan internet (Hasil evaluasi kinerja tahun 2023).	memenuhi persyaratan layanan kepegawaian sehingga perlu dilaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kualitas dan implementasi kemampuan daerah di dalam memenuhi kelengkapan administrasi yang tengah bertransformasi dari berkas fisik (cetak) menjadi digital. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut akan diperoleh butir kebijakan yang dapat didorong guna memaksimalkan layanan kepegawaian bagi instansi dan pemangku kepentingan terkait.
Tindaklanjut	Penyampaian Saran Kepada (1) Kantor Regional IX BKN Jayapura dan (2) Pemangku Kepentingan Terkait (BKD, BKPSDM, BKPP dan BKPSDA di Wilayah Kerja).	

Kendala yang dihadapi :

- Responden survei yang masih didominasi oleh penerima layanan yang datang di Kantor Regional IX BKN Jayapura daripada yang mengisi melalui survei online dan tidak meratanya penyebaran sampel per-unit kerja di Kantor Regional IX BKN Jayapura.
- Pengambilan sampel responden yang masih terpusat pada lobi atau fasilitas PTSP Kantor Regional IX BKN Jayapura.
- Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa, Persyaratan pelayanan teknis dan administrasi yang dapat dipahami dan dilengkapi (U1) mendapatkan nilai terendah yaitu 3,04. Selanjutnya prosedur pelayanan yang diterapkan sudah sesuai kebijakan yang berlaku (U2) mendapatkan nilai 3,09 adalah nilai terendah kedua. Begitu juga keterjangkauan, efisiensi dan penanganan pengaduan (U8) termasuk tiga unsur terendah.

- Timbulnya berbagai kendala layanan yang tidak terakomodir secara utuh di dalam survei dan terindikasi enggan nya penerima layanan untuk memberi penilaian terhadap pelayanan kepegawaian yang diterima.

Rencana Tindak Lanjut :

- Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik sebagai agenda rutin bersamaan dengan program Penyelesaian Permasalahan Kepegawaian sebagai sarana meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat dan pembekalan rutin terhadap instansi serta pejabat pengelola kepegawaian selaku stakeholder utama Kantor Regional IX BKN Jayapura.
- Penetapan Nota Dinas sebagai dasar mempertegas kewajiban pengumpulan SKM Layanan yang bersumber dari masing-masing unit kerja di Kantor Regional IX BKN Jayapura.
- Merekomendasikan diterbitkannya kebijakan dan informasi sedia setiap saat yang solutif yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan membangun kemandirian dan pemahaman pengguna layanan..

Efisiensi Sumber Daya pada pelaksanaan IKU 4 yaitu :

$$\text{Efisiensi} = \frac{(\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}) - \text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}} \times 100\%$$

Tabel 3.11 Efisiensi Sumber Daya IKU 4

IKU	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi
IKU 4	96	84	87	301.100.000	280.174.989	98,93%

∴ Dari sisi penggunaan dana, kinerja terhadap IKU ini telah dicapai secara efisien. Program atau kegiatan yang mendukung IKU ini yaitu Penetapan NIP, Penetapan Kenaikan Pangkat, Pertimbangan Teknis Pensiun PNS, Dokumen Arsip Kepegawaian.

SASARAN III

TERWUJUDNYA PEMENUHAN KEBIJAKAN TEKNIS MANAJEMEN ASN

IKU 5 Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis dan Instrumen Manajemen ASN di Kantor Regional IX BKN

Pada IKU 5 ini, Kantor Regional IX BKN Jayapura melaksanakan pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN. Pemenuhan Kebijakan Teknis Manajemen ASN bermakna bahwa Kantor Regional IX BKN sebagai Pembina Manajemen ASN berkewajiban untuk menyusun kebijakan teknis yang berkaitan dengan Manajemen ASN. Ukuran yang menggambarkan pemenuhan regulasi teknis dan instrumen manajemen ASN yang ditetapkan di level Kantor Regional.

Formula yang digunakan untuk Pengukuran pada IKU 5 ini sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah regulasi teknis dan instrumen yang berhasil ditetapkan}}{\text{Jumlah draf regulasi teknis dan instrumen yang diusulkan}} \times 100$$

Tabel 3.12 Realisasi Kinerja IKU 5

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
IKU 5 Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis dan Instrumen Manajemen ASN di Kantor Regional IX BKN	100	100	100

Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis dan Instrumen Manajemen ASN di Kantor Regional IX BKN pada tahun 2023 yaitu 100% dan target telah terpenuhi.

Sebagai bahan pertimbangan atas pengukuran dan evaluasi terhadap target dan realisasi Renstra 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 5

IKU	2020		2021		2022		2023		2024
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target PK
IKU 5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pemenuhan Regulasi Teknis dan instrumen Manajemen ASN di Kantor Regional IX BKN mencapai 100% capaian tersebut sama seperti tahun sebelumnya.

Efisiensi Sumber Daya pada pelaksanaan IKU 5 yaitu :

$$\text{Efisiensi} = \frac{(\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}) - \text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}} \times 100\%$$

$$\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}$$

Tabel 3.14 Efisiensi Sumber Daya IKU 5

IKU	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi
IKU 5	100	100	100	-	-	-

Dari sisi penggunaan dana tidak terdapat pagu anggaran namun hal tersebut tidak membuat terhambat pencapaian realisasi kinerja pada IKU 5 ini.

SASARAN IV

TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS DATA SISTEM INFORMASI ASN

IKU 6 Persentase Sistem Informasi Kepegawaian Pengelola ASN yang Terintegrasi Dengan SI ASN di wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN



Dalam rangka menuju satu data ASN, Kantor Regional IX BKN Jayapura turut mengambil peran untuk meningkatkan jumlah sistem pengelola kepegawaian di instansi daerah agar terintegrasi dengan data kepegawaian nasional yang di kelola oleh BKN. Indikator ini menggambarkan integrasi aplikasi kepegawaian ASN secara menyeluruh berbasis teknologi yang dilakukan melalui pengintegrasian simpeg dan SIASN baik melalui webservice maupun menggunakan Simpegnas (Sistem Informasi Kepegawaian Nasional) dalam rangka mewujudkan proses layanan manajemen kepegawaian yang efektif dan efisien. Persentase ini dilihat dari seberapa banyak Instansi yang terintegrasi ke SIASN baik melalui *webservice* maupun menggunakan SIMPEGNAS. Formula yang digunakan untuk Pengukuran pada IKU 6 ini sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah instansi yang terintegrasi ke SIASN baik melalui webservice maupun menggunakan Simpegnas}}{\text{Jumlah instansi pemerintah di wilayah kerja Kantor Regional IX BKN}} \times 100$$

Tabel 3.14 Realisasi Kinerja IKU 6

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
IKU 6 Persentase Sistem Informasi Kepegawaian Pengelola ASN yang Terintegrasi Dengan SI ASN di wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN	95%	100%	105.26%

Persentase Sistem Informasi Kepegawaian Pengelola ASN yang Terintegrasi dengan SI ASN di wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN pada tahun 2023 telah memenuhi target yang ditetapkan sebesar 95% dengan realisasi sebesar 100%. Maka hal tersebut membuktikan bahwa Sistem Informasi Kepegawaian Pengelola ASN yang Terintegrasi dengan SI ASN di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN sudah terpenuhi. Jumlah Instansi di wilayah kerja Kanreg IX BKN Jayapura yang telah terintegrasi secara dua arah atau terintegrasi melalui *Web Service* yaitu 2 instansi (Pemerintah Kab. Jayapura dan Pemerintah Kab. Intan Jaya) sedangkan yang Subdomain atau Terintegrasi melalui Simpegnas yaitu 31 Instansi.

Gambar 3.5 Integrasi SIASN

REKAPITULASI						
Kanreg	Terintegrasi Melalui Web Service	Belum Terintegrasi Melalui Web Service	Sudah Memiliki Subdomain Simpegnas	Belum Memiliki Subdomain	Total Instansi	Realisasi Kinerja Desember 2023
0	41	0	10	0	50	100.00%
1	37	0	0	0	42	100.00%
2	57	0	2	0	59	100.00%
3	30	0	1	0	31	100.00%
4	16	0	50	0	76	100.00%
5	8	0	24	0	32	100.00%
6	9	0	26	0	34	100.00%
7	17	0	32	0	49	100.00%
8	22	0	24	0	46	100.00%
9	2	0	31	0	33	100.00%
10	9	0	36	0	44	100.00%
11	12	0	22	0	34	100.00%
12	13	0	26	0	43	100.00%
13	5	0	19	0	24	100.00%
14	3	0	15	0	18	100.00%
TOTAL	367	0	339	0	626	100.00%

Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 6

IKU	2020		2021		2022		2023		2024
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target PK
IKU 6	50%	50%	50%	50%	95%	18.18%	95%	100%	100%

Telah terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Dapat dilihat dari instansi pemerintah yang telah terintegrasi.

Efisiensi Sumber Daya pada pelaksanaan IKU 6 yaitu :

$$\text{Efisiensi} = \frac{(\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}) - \text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}} \times 100\%$$

Tabel 3.16 Efisiensi Sumber Daya

IKU	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi
IKU 6	95%	100%	1	-	-	-

Kendala yang dihadapi :

- Simpegnas belum sepenuhnya digunakan secara baik (10%) karena masih terdapat instansi yang belum paham dengan pemanfaatannya.

Rencana Tindak lanjut :

- Memfasilitasi Instansi Daerah dalam pemanfaatan Simpegnas.

SASARAN V

TERWUJUDNYA PENINGKATAN DIGITALISASI PENYELENGGARAAN LAYANAN MANAJEMEN

IKU 7 Persentase Layanan Manajemen ASN yang Berbasis Digital di Kantor Regional IX BKN

Sasaran strategis ini adalah Terwujudnya peningkatan digitalisasi penyelenggaraan layanan manajemen ASN. Indikator ini bermakna bahwa penyelenggaraan layanan kepegawaian harus berbasis digital sehingga proses bisnis mampu berjalan lebih efektif dan mudah diakses oleh pengguna layanan kepegawaian. Persentase Layanan Manajemen ASN yang Berbasis Digital di Kantor Regional IX BKN diukur berdasarkan layanan manajemen ASN yang terdigitalisasi dari *offline* menjadi *online* di Kantor Regional IX BKN. Adapun jenis layanan yang menjadi ukuran digitalisasi sesuai dengan kewenangan Kantor Regional diantaranya :

- Pengadaan CASN
- Kenaikan Pangkat IV/b
- Pencantuman Gelar
- Kartu Pegawai
- Kartu Istri/Kartu Suami
- Pindah Instansi
- CLTN
- Penyesuaian Masa Kerja
- Mutasi Lain Lain
- Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Janda Dudanya
- Mutasi Keluarga
- Pengaktifan Kembali

Formula yang digunakan untuk Pengukuran pada IKU 7 ini sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah layanan yang sudah didigitalisasi}}{12} \times 100$$

Tabel 3.17 Realisasi Kinerja IKU 7

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
IKU 7 Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis dan Instrumen Manajemen ASN di Kantor Regional IX BKN	100%	91,67%	96,49%

Realisasi IKU 7 Persentase Layanan Manajemen ASN yang Berbasis Digital di Kantor Regional IX BKN pada tahun 2023 sebesar 91,67% dan belum memenuhi target dikarenakan masih terdapat jenis layanan yang dalam pembahasan proses bisnis dengan Direktorat PPSIASN,

Tabel 3.18 Jenis Layanan Manajemen ASN yang Terdigitalisasi

Tabel No	Jenis Layanan Manajemen ASN	Sumber	Link	Terdigitalisasi
1	Pengadaan CASN	SI ASN	https://siasn.bkn.go.id/	✓
2	Kenaikan Pangkat IV/b	SI ASN	https://siasn.bkn.go.id/	✓
3	Pencatuman Gelar	SI ASN	https://siasn.bkn.go.id/	✓
4	Kartu Pegawai	SI ASN	https://siasn.bkn.go.id/	✓
5	Kartu Istri / Kartu Suami	SI-NOKEN	http://103.118.175.145/si-noken.bkn9jayapura.net	✓
6	Pindah Instansi	SI ASN	https://siasn.bkn.go.id/	✓
7	Penyesuaian Masa Kerja	SI ASN	https://siasn.bkn.go.id/	✓
8	Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Janda Dudanya	SI ASN	https://siasn.bkn.go.id/	✓
9	Mutasi Keluarga	SI ASN	https://siasn.bkn.go.id/	✓
10	CLTN	SI ASN	https://siasn.bkn.go.id/	✓
11	Mutasi Lain-Lain	SI ASN	https://siasn.bkn.go.id/	✓

Sebagai bahan pertimbangan atas pengukuran dan evaluasi terhadap target dan realisasi Renstra 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel 3.19 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 7

IKU	2020		2021		2022		2023		2024
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target PK
IKU 7	50%	50%	50%	50%	95%	18,18%	95%	91,67%	100%

Telah terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Dapat dilihat dari instansi

Efisiensi Sumber Daya pada pelaksanaan IKU 7 yaitu :

$$\text{Efisiensi} = \frac{(\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}) - \text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}} \times 100\%$$

Tabel 3.20 Efisiensi Sumber Daya IKU 7

IKU	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi
IKU 7	100%	91,67%	96,48%	-	-	-

Kendala yang dihadapi :

- pemanfaatan layanan manajemen ASN yang berbasis Digital yang belum terlaksana yaitu pengaktifan kembali
- dalam penggunaan aplikasi masih sering terjadi gangguan

Rencana Tindak Lanjut :

- berkoordinasi dengan pusat mengenai layanan pengaktifan kembali yang masih dalam proses dan koordinasi terkait aplikasi yang sering terjadi gangguan.

SASARAN VI

TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN MANAJEMEN ASN

IKU 8 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian yang Ditindaklanjuti

Sasaran strategis pada IKU 8 Kantor Regional IX BKN Jayapura adalah dengan terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen. Indikator Kinerja Utama dalam terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen ASN adalah persentase rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian kepegawaian yang ditindaklanjuti. Indikator Kinerja Utama terhadap presentase rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian kepegawaian yang ditindaklanjuti bertujuan untuk memastikan kebijakan dan implementasi serta mewujudkan pengawasan dan pengendalian manajemen ASN pada instansi pemerintah sesuai dengan NSPK.

Formula yang digunakan untuk Pengukuran pada IKU 8 ini sebagai berikut :

Realisasi =
$$\frac{\text{jumlah rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian yang ditindaklanjuti oleh instansi pemertatah di wilayah kerja Kantor Regional IX BKN}}{\text{jumlah rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian}} \times 100\%$$

Tabel 3.21 Realisasi Kinerja IKU 8

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
IKU 8 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Realisasi IKU 8 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian yang Ditindaklanjuti pada tahun 2023 sudah memenuhi target yang ditetapkan. Sebagai bahan pertimbangan atas pengukuran dan evaluasi terhadap target dan realisasi Renstra 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel 3.22 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 8

IKU	2020		2021		2022		2023		2024
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target PK
IKU 8	75%	75%	75%	75%	85%	100%	95%	100%	100%

Telah terjadi peningkatan terhadap capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian yang Ditindaklanjuti dari tahun-tahun sebelumnya.

Grafik 3.1 Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian

**Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian
Kepegawaian**



Efisiensi Sumber Daya pada pelaksanaan IKU 8 yaitu :

$$\text{Efisiensi} = \frac{(\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}) - \text{Realisasi Anggaran} \times 100\%}{\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}}$$

Tabel 3.23 Efisiensi Sumber Daya IKU 8

IKU	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi
IKU 8	95%	100%	100%	258.178.000	226.665.522	2,58

Dari sisi penggunaan dana, kinerja IKU ini telah tercapai secara efisiensi 2,58%, program atau kegiatan yang mendukung IKU ini yaitu dituangkan dalam kegiatan Perjalanan Dinas dalam rangka penyelesaian permasalahan kepegawaian di Wilayah Kerja Kanreg IX BKN Jayapura.

Kendala yang dihadapi :

- masih terdapat instansi daerah yang belum menindaklanjuti rekomendasi yang telah dilakukan oleh Kanreg IX BKN Jayapura

Rencana Tindak Lanjut :

- melaksanakan pemantauan terhadap tindaklanjut dari rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Kanreg IX
- melaksanakan Kegiatan Penyelesaian Permasalahan Kepegawaian

SASARAN VII

TERWUJUDNYA MANAJEMEN INTERNAL BKN YANG EFEKTIF, EFISIEN DAN AKUNTABEL

IKU 9 Indeks Profesionalitas ASN Kantor Regional IX BKN

Indeks Profesionalitas ASN Kantor Regional IX BKN Jayapura dalam menghasilkan tingkat Profesionalitas ASN berdasarkan standar Profesionalitas tertentu. Tingkat profesionalitas pegawai ASN bagi Kantor Regional IX BKN nilai dari Indeks Profesionalitas dapat digunakan sebagai pengembangan diri dalam upaya peningkatan profesionalitas ASN yang hasilnya digunakan sebagai penilaian dan evaluasi dalam upaya peningkatan profesionalitas ASN. Capaian IP ASN Kantor Regional IX BKN Jayapura dapat dilihat pada Aplikasi DJASN. Capaian tersebut diukur berdasarkan 4 dimensi dan kategori tingkat Profesionalitas ASN antara lain :



Formula yang digunakan untuk Pengukuran pada IKU 9 ini sebagai berikut:

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} \cdot R_{1j}$$

$$IP_2 = W_{2k} \cdot R_{2k}$$

$$IP_3 = W_{3l} \cdot R_{3l}$$

$$IP_4 = W_{4m} \cdot R_{4m}$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalitas

IP_i = Indeks Profesionalitas ke-i

IP_1 = Indeks Profesionalitas: Dimensi Kualifikasi

IP_2 = Indeks Profesionalitas: Dimensi Kompetensi

IP_3 = Indeks Profesionalitas: Dimensi Kinerja

IP_4 = Indeks Profesionalitas: Dimensi Disiplin

$W_{1j} \cdot R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban Indikator Kualifikasi ke-j

$W_{2k} \cdot R_{2k}$ = Bobot Indikator Kompetensi ke-k * Rating Jawaban Indikator Kualifikasi ke-k

$W_{3l} \cdot R_{3l}$ = Bobot Indikator Kinerja ke-l * Rating Jawaban Indikator Kualifikasi ke-l

$W_{4m} \cdot R_{4m}$ = Bobot Indikator Disiplin ke-m * Rating Jawaban Indikator Kualifikasi ke-m

Tabel 3.23 Realisasi Kinerja IKU 9

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
IKU 9 Indeks Profesionalitas ASN Kantor Regional IX BKN	80	83,14	103,93

Realisasi IKU 9 Indeks Profesionalitas ASN Kantor Regional IX BKN pada tahun 2023 telah mencapai target sebesar 83,14 dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya IP ASN ini diukur dengan 4 indikator yang terdiri dari dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin.

Sebagai bahan pertimbangan atas pengukuran dan evaluasi terhadap target dan realisasi Renstra 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel 3.24 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 9

IKU	2020		2021		2022		2023		2024
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target PK
IKU 9	80	75	80	80	80	76.09	80	83.14	80

Terjadi peningkatan nilai Indeks Profesionalitas ASN di Kanreg IX BKN Jayapura dari tahun sebelumnya. Peningkatan nilai ini dilihat dari adanya peningkatan kompetensi pegawai melalui kegiatan CMB dan Komunitas belajar.



Efisiensi Sumber Daya pada pelaksanaan IKU 9 yaitu :

$$\text{Efisiensi} = \frac{(\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}) - \text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}} \times 100\%$$

Pagu Anggaran x Capaian Kinerja

Tabel 3.25 Efisiensi Sumber Daya IKU 9

IKU	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi
IKU 9	80	83,14	103,93	-	-	-

Dari sisi penggunaan dana, kinerja terhadap IKU ini tidak terdapat pada pagu anggaran yang dialokasikan.

Strategi Keberhasilan

- Pemanfaatan aplikasi CMB (Coaching, Mentoring, dan Belajar Mandiri) untuk peningkatan Kompetensi Pegawai sehingga berdampak pada peningkatan nilai Kompetensi Pegawai pada IP ASN Kanreg IX BKN.

Kendala yang dihadapi :

- Belum semua pegawai memperbarui data pelatihan, diklat maupun sertifikat yang telah diperoleh dan masih ada pegawai yang belum melakukan/menginput kegiatan CMB dan juga pegawai yang telah melakukan komunitas belajar tidak membuat laporan sehingga tidak terbitnya sertifikatnya oleh biro sdm.

Rencana Tindak Lanjut :

- Mengikutsertakan pegawai pada pelatihan -pelatihan teknis yang dapat meningkatkan kompetensi serta mendorong pegawai untuk meningkatkan pendidikannya dan kompetensi dengan mengikuti atau melakukan kegiatan CMB/Komunitas Belajar .

IKU 10 Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang Terstandar di Kantor Regional IX BKN

Sistem Informasi Kantor Regional IX BKN Jayapura telah terstandar dan dimanfaatkan dengan baik. Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mendorong pemanfaatan sistem informasi pengelolaan internal di Kantor Regional IX BKN dalam rangka menunjang SPBE BKN. Formula yang digunakan untuk pengukuran pada IKU ini adalah sebagai berikut:

$$Realisasi = \frac{\frac{a_1}{b_1} + \frac{a_2}{b_2} + \frac{a_3}{b_3} + \dots + \frac{a_{15}}{b_{15}}}{15} \times 100\%$$

Keterangan

a1 = Jumlah pegawai yang menggunakan aplikasi SAKTI berdasarkan hasil survei

b1 = Jumlah pegawai yang seharusnya menggunakan aplikasi SAKTI

a2 = Jumlah pegawai yang menggunakan aplikasi SMART berdasarkan hasil survei

b2 = Jumlah pegawai yang seharusnya menggunakan aplikasi SMART

a3 = Jumlah pegawai yang menggunakan aplikasi E-Money berdasarkan hasil survei

b3 = Jumlah pegawai yang seharusnya menggunakan aplikasi E-Money

a4 = Jumlah pegawai yang menggunakan aplikasi OMSPAN berdasarkan hasil survei

b4 = Jumlah pegawai yang seharusnya menggunakan aplikasi OMSPAN

a5 = Jumlah pegawai yang menggunakan aplikasi SPEKTRA berdasarkan hasil survei

b5 = Jumlah pegawai yang seharusnya menggunakan aplikasi SPEKTRA

a6 = Jumlah pegawai yang menggunakan aplikasi SIKAP berdasarkan hasil survei

b6 = Jumlah pegawai yang seharusnya menggunakan aplikasi SIKAP

a7 = Jumlah pegawai yang menggunakan aplikasi LBP berdasarkan hasil survei

b7 = Jumlah pegawai yang seharusnya menggunakan aplikasi LBP

a8 = Jumlah pegawai yang menggunakan aplikasi Presensi berdasarkan hasil survei

b8 = Jumlah pegawai yang seharusnya menggunakan aplikasi

a9 = Jumlah pegawai yang menggunakan aplikasi Kinerja berdasarkan hasil survei

b9 = Jumlah pegawai yang seharusnya menggunakan aplikasi Kinerja

a10 = Jumlah pegawai yang menggunakan aplikasi SIMPEG berdasarkan hasil survei

b10 = Jumlah pegawai yang seharusnya menggunakan aplikasi SIMPEG

a11 = Jumlah pegawai yang menggunakan aplikasi CMB berdasarkan hasil survei

b11 = Jumlah pegawai yang seharusnya menggunakan aplikasi CMB

a12 = Jumlah pegawai yang menggunakan aplikasi DS berdasarkan hasil survei

b12 = Jumlah pegawai yang seharusnya menggunakan aplikasi DS

a13 = Jumlah pegawai yang menggunakan aplikasi e-mail BKN berdasarkan hasil survei

b13 = Jumlah pegawai yang seharusnya menggunakan aplikasi e-mail BKN

a14 = Jumlah pegawai yang menggunakan aplikasi Loker BKN berdasarkan hasil survei

b14 = Jumlah pegawai yang seharusnya menggunakan aplikasi Loker BKN

a15 = Jumlah pegawai yang menggunakan aplikasi SRIKANDI berdasarkan hasil survei

b15 = Jumlah pegawai yang seharusnya menggunakan aplikasi SRIKANDI

Tabel 3.26 Realisasi Kinerja IKU 10

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
IKU 10 Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang Terstandar di Kantor Regional IX BKN	100%	100%	100%

Capaian Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang terstandar di Kantor Regional IX BKN pada Tahun 2023 telah memenuhi target yaitu 100% berarti bahwa Kantor Regional IX BKN Jayapura telah memanfaatkan Sistem Informasi yang terintegrasi dengan Sistem Informasi yang dikelola oleh BKN.



Formulir Survei Pemanfaatan Sistem Informasi di Lingkungan Kanreg IX BKN

Tabel 3.27 Pemanfaatan Sistem Informasi di Kanreg IX BKN

No	Aplikasi Standar	Jumlah Pegawai yang menggunakan aplikasi	Jumlah Pegawai yang menggunakan Aplikasi sesuai Survey	Persentase
1	Sakti	11	11	100%
2	SMART	4	4	
3	E-Monev	5	5	
4	Om Span	11	11	
5	Spektra	5	5	
6	SIKAP	3	3	
7	LBP	67	67	
8	Presensi	67	67	
9	Kinerja	67	67	
10	Simpeg	67	67	
11	Aplikasi CMB	67	67	
12	DS	18	18	
13	Email BKN	67	67	
14	Loker BKN	67	67	
15	Srikandi	67	67	

Sebagai bahan pertimbangan atas pengukuran dan evaluasi terhadap target dan realisasi Renstra 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel 3.28 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 10

IKU	2020		2021		2022		2023		2024
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target PK
IKU 10	50%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%

Terjadi peningkatan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023. Kantor Regional IX BKN Jayapura selain memanfaatkan Sistem Informasi yang terintegrasi dengan Sistem Informasi yang dikelola

BKN telah melakukan inovasi dengan membuat aplikasi yang digunakan untuk layanan konsultasi kepegawalan (SIKOTEKA).



Efisiensi Sumber Daya pada pelaksanaan IKU 10 yaitu :

$$\text{Efisiensi} = \frac{(\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}) - \text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}} \times 100\%$$

$$\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}$$

Tabel 3.29 Efisiensi Sumber Daya IKU 10

IKU	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi
IKU 10	100%	100%	100%	-	-	-

Dari sisi penggunaan dana, kinerja terhadap IKU ini tidak terdapat pada pagu anggaran yang dialokasikan. Namun, dilihat dari segi proses dengan dimanfaatkannya sistem informasi terstandar, terjadi pengurangan dalam berkas fisik dan efisiensi waktu jadi semakin singkat.

Strategi Keberhasilan

Strategi dalam pencapaian IKU ini yaitu dengan selalu mengupdate dan menjalankan ketentuan dari BKN Pusat apabila terdapat perubahan atau pembaharuan atas pemanfaatan sistem informasi yang terstandar.

Kendala yang dihadapi :

- kendala yang sering terjadi yaitu aplikasi seringkali eror
- pemanfaatan sistem informasi yang terstandar terkendala pada SDM di kanreg

Rencana Tindak Lanjut :

- melaksanakan pelatihan dan sosialisasi bagi pegawai di Kanreg IX BKN

IKU 11 Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kantor Regional IX BKN

Indikator Kinerja Utama ini merupakan suatu ukuran yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi di BKN yang dilakukan oleh KemenpanRB untuk mengukur nilai perubahan organisasi di BKN.

Tabel 3.30 Realisasi Kinerja IKU 11

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
IKU 11 Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kantor Regional IX BKN	83	78,57	94,66

Berdasarkan LKE Kementerian PANRB yang tertera pada aplikasi Portal RB Nasional, indeks RB BKN Tahun 2023 adalah 78,57 dengan **Predikat BB**. Realisasi IKU pada Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Tahun 2023 terdapat kenaikan sebesar 1,71 dari realisasi tahun sebelumnya. Sebagai bahan pertimbangan atas pengukuran dan evaluasi terhadap target dan realisasi Renstra 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel 3.31 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 11

IKU	2020		2021		2022		2023		2024
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target PK
IKU 11	80	76,86	80	76,27	82	77.29	83	78,57	86

Efisiensi Sumber Daya pada pelaksanaan IKU 11 yaitu :

$$\text{Efisiensi} = \frac{(\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}) - \text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}} \times 100\%$$

Tabel 3.32 Efisiensi Sumber Daya IKU 11

IKU	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi
IKU 11	83	N/A	N/A	-	-	-

Terdapat beberapa kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja IKU ini antara lain :

- Kendala yang dihadapi Pelaksanaan RB di Kantor Regional IX BKN mengalami kendala karena kekurangan personel untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Tugas-tugas ini membutuhkan

porsi pekerjaan yang signifikan, namun seringkali dilaksanakan dari berbagai bidang, sehingga hasilnya tidak optimal.

- Adanya perubahan Road Map RB Nasional oleh Kementerian PANRB, sehingga rencana aksi RB unit eselon II belum sepenuhnya selaras dengan rencana aksi yang tertuang pada Keputusan Kepala BKN Nomor 465 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BKN Nomor 178/KEP/2020 tentang Road Map RB BKN 2020-2024
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas rencana aksi RB masih belum optimal.

Tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk memastikan pelaksanaan RB pada tahun 2024 agar dapat berjalan dengan lancar diantaranya :

- Rencana Tindak Lanjut perlu lebih bijak lagi jika struktur organisasi diperbarui dengan menetapkan unit atau divisi khusus yang bertanggung jawab atas penyelesaian laporan RB, hal ini akan memungkinkan.
- Strategi keberhasilan
 1. Penyusunan Tim Reformasi Birokrasi menjadi kunci untuk pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan



IKU 12 Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Kantor Regional IX BKN

Kantor Regional IX BKN Jayapura pada tahun 2023 untuk nilai SAKIP menargetkan sebesar 80 dari target yang ditetapkan, Kantor Regional IX BKN Jayapura memperoleh capaian sebesar 81.25. Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kantor Regional IX BKN menggambarkan nilai akuntabilitas mulai dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja yang dievaluasi oleh Inspektorat. Pengukuran IKU ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penilaian hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat dengan kriteria penilaian sebagai berikut :

KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRESTASI
AA	>90-100	Sangat Memuaskan
BB	>70-80	Sangat Baik
B	>60-70	Baik
CC	>50-60	Cukup (Memadai)
C	>30-50	Kurang
D	0-30	Sangat Kurang

Tabel 3.33 Realisasi Kinerja IKU 12

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
IKU 12 Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Kantor Regional IX BKN	80	65	81.25

Realisasi IKU ini pada tahun 2023 tidak mencapai target realisasi yang diperoleh sebesar 65. Sebagai bahan pertimbangan atas pengukuran dan evaluasi terhadap target dan realisasi Renstra 2020-2024 sebagai beriku :

Tabel 3.34 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 12

IKU	2020		2021		2022		2023		2024
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target PK
IKU 12	70	70	70	70	79	70.60	80	65	82

Skor atas hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kantor Regional IX BKN Jayapura mengalami penurunan atau belum memenuhi target yang sudah ditetapkan, dikarenakan ada beberapa aturan-aturan yang berubah terkait penilaian terhadap evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Efisiensi Sumber Daya pada pelaksanaan IKU 12 yaitu :

$$\text{Efisiensi} = \frac{(\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}) - \text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}} \times 100\%$$

Tabel 3.35 Efisiensi Sumber Daya IKU 12

IKU	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi
IKU 12	80	65	81,25	120.559.000	108.840.640	9,79%

Penggunaan dana dari IKU ini sebesar Rp.108.559.000 dari pagu sebesar Rp.120.559.000 program yang mendukung kegiatan ini yaitu Perencanaan, Reviu Dokumen Kinerja dan Penyusunan SAKIP.

- Kendala yang dihadapi :

Terdapat beberapa indikator kinerja yang belum relevan

- Dokumen perencanaan kinerja belum dipublikasikan pada website Kantor Regional IX BKN Jayapura secara up to date
- Target kinerja yang ditetapkan juga belum sepenuhnya achievable dan realistis.
- selain itu juga adanya perubahan atas aturan penilaian evaluasi SAKIP

- Rencana Tindak Lanjut :

Melakukan evaluasi internal mengenai Perencanaan Kinerja, Pengukuran dan Pelaporan Kinerja agar dapat meningkatkan kinerja pada Kanreg IX.

Dalam pelaksanaan SAKIP, Faktor Keberhasilan dalam IKU ini adalah :

1. Penyusunan Tim Kinerja Organisasi Internal sehingga proses Perencanaan, Pelaporan hingga Evaluasi Kinerja dapat berjalan dengan lancar;
2. Kegiatan yang mendukung pelaksanaan SAKIP di Kantor Regional IX BKN Rapat Penyusunan PK dan Dokumen Perencanaan lainnya,



IKU 13 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Regional IX BKN

Kantor Regional IX BKN Jayapura pada Persentase terhadap nilai IKPA menargetkan 93%. Dari target yang ditetapkan Kantor Regional IX BKN Jayapura memperoleh realisasi sebesar 93.86 (nilai IKPA tercantum pada Aplikasi OMSPAN Kemenkeu).

tabel

Tabel 3.36 Realisasi Kinerja IKU 13

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
IKU 13 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Regional IX BKN	93	93.86	100.92%

Realisasi IKU ini pada tahun 2023 adalah sebesar 93.86 dengan capaian persentase yang diperoleh sebesar 100.92% dari target yang ditetapkan sebesar 93.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR REGIONAL IX BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAYAPURA

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Lampiran 2023

No	Kode IKPA	Kode BA	Kode Sub	Uraian Aktivitas	Keterangan	Kualitas Pelaksanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran						Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Substansi	Nilai Akhir (Saldo Tahun/Kumulatif Substansi)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman II DIPA	Penyisihan Anggaran	Belanja Komitmen	Penyelesaian Tagihan	Pengisian UPT dan TUP	Diseriasi BPN	Capaian Output				
1	001	001	802000	KANTOR REGIONAL IX BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAYAPURA	Nilai	100.00	71.72	50.94	27.14	100.00	83.21	80.00	88.27	93.86	100%	93.86	
					Saldo	10	10	30	10	10	10	1	25				
					Nilai Akhir	110.00	7.27	19.72	2.71	10.00	9.32	4.00	24.02				
					Nilai Akhir	50.36			3.12				19.27				

Sebagai bahan pertimbangan atas pengukuran dan evaluasi terhadap target dan realisasi Renstra 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel 3.37 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 13

IKU	2020		2021		2022		2023		2024
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target PK
IKU 13	80	80	80	92	93	94.24	93	93.86	96

Terjadi penurunan persentase sebesar 0.38% dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya penurunan nilai pada kualitas perencanaan anggaran (deviasi halaman III DIPA).

Efisiensi Sumber Daya pada pelaksanaan IKU 13 yaitu :

$$\text{Efisiensi} = \frac{(\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}) - \text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}} \times 100\%$$

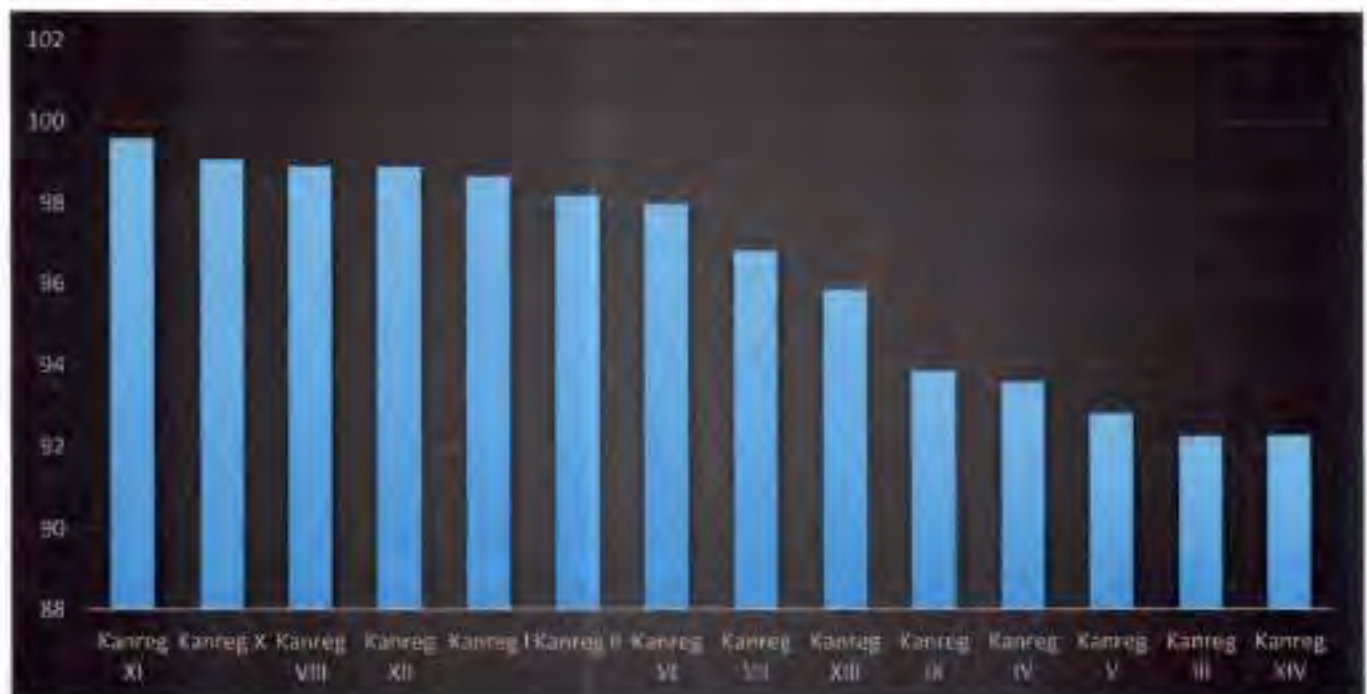
Pagu Anggaran x Capaian Kinerja

Tabel 3.38 Efisiensi Sumber Daya IKU 13

IKU	Target Kinerja		Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Ef
IKU 13	93%		93,86%	100,92%	12.563.774.000	12.291.299.334	1

Penggunaan Dana pada IKU ini sebesar 12.291.299.334 dari jumlah pagu sebesar 12.563.774.000. Program atau kegiatan yang mendukung kegiatan ini yaitu Layanan Perkantoran, Layanan Sarana dan Prasarana dan Layanan BMN dalam rangka menunjang kinerja Kantor Regional IX BKN.

Grafik 3.2 Perbandingan Nilai IKPA Kantor Regional I - XIV



Kendala yang dihadapi :

- Adanya kebijakan blokir anggaran yang ditetapkan oleh kemenkeu
- Kendala yang dihadapi yaitu deviasi Hal. III dikarenakan Adanya kesulitan menentukan ketepatan rencana penarikan dana diantaranya dikarenakan adanya perubahan kebutuhan anggaran sehingga diperlukan penyesuaian (Revisi Anggaran) terlebih dahulu sebelum bisa direalisasikan.

Rencana Tindak Lanjut :

- Meminimalisir Revisi Anggaran dan Hal. III DIPA
- Melakukan Kegiatan dan Penyerapan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan
- Menyusun laporan keuangan sebelum batas waktu yang ditentukan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku

Strategi Keberhasilan :

- Penyusunan Rencana Realisasi Kegiatan dan Anggaran

IKU 14 Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit / Pemeriksaan oleh BPK / Inspektorat di Kantor Regional IX BKN

Hasil tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Inspektorat telah diselesaikan baik temuan keuangan maupun temuan administrasi keuangan. Hal tersebut di dukung dengan bukti pengembalian SSBP dan tanggapan penyelesaian temuan administrasi keuangan. Formula yang digunakan untuk Pengukuran pada IKU 14 ini sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah temuan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah temuan BPK/Inspektorat}} \times 100\%$$

Tabel 3.39 Realisasi Kinerja IKU 14

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
IKU 14 Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat di Kantor Regional IX BKN	100%	100%	100%

Realisasi persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit / Pemeriksaan oleh BPK / Inspektorat di Kantor Regional IX BKN memperoleh capaian sebesar 100%. Hasil dari pemeriksaan Inspektorat telah diselesaikan dan ditindaklanjuti. Upaya yang dilaksanakan dalam menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan di Kantor Regional IX BKN Jayapura yaitu dengan melengkapi kekurangan dokumen atau memperbaiki dokumen keuangan terkait temuan administrasi keuangan dan lebih teliti lagi dalam memverifikasi dokumen agar kedepannya tidak ada temuan yang sama.

Sebagai bahan pertimbangan atas pengukuran dan evaluasi terhadap target dan realisasi Renstra 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel 3.40 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 14

IKU	2020		2021		2022		2023		2024
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target PK
IKU 14	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Realisasi persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit / Pemeriksaan oleh BPK / Inspektorat di Kantor Regional IX BKN Jayapura sama dengan tahun sebelumnya yakni 100%.

Sumber Daya pada pelaksanaan IKU 14 yaitu :

$$Efisiensi = \frac{(Pagu Anggaran \times Capaian Kinerja) - Realisasi Anggaran}{Pagu Anggaran \times Capaian Kinerja} \times 100\%$$

$$Pagu Anggaran \times Capaian Kinerja$$

Tabel 3.41 Efisiensi Sumber Daya IKU 14

IKU	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi
IKU 14	100%	100%	100%	-	-	-

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor SP DIPA-088.01.2.622390/2023 tanggal 30 November 2022, Kantor Regional IX BKN memperoleh Pagu Anggaran sebesar Rp.12.563.774.000 (Dua Belas Miliar Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) guna membiayai 2 Program dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN sebesar Rp.2.768.340.000,- (Dua Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Tiga Ratus Empat Puluh Ribu
2. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp.9.795.434.000,- (Sembilan Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah).

Anggaran pada Kantor Regional IX BKN Jayapura sudah melakukan revisi anggaran sebanyak 13 kali, revisi yang dilakukan berupa penambahan anggaran untuk seleksi CASN dan CPPPK Tahun Anggaran 2023 dan revisi anggaran untuk dialihkan pada kegiatan-kegiatan yang masih memerlukan anggaran.

Tabel 3.42 Pagu Anggaran Kanreg IX BKN Jayapura Tahun 2023

Uraian Program	Anggaran			
	Pagu	Pagu Revisi	Realisasi	%
Co. Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	Rp. 1.370.400.000	Rp. 2.768.340.000	Rp. 2.619.568.020	94.63%
WA. Program Dukungan Manajemen	Rp. 10.213.749.000	Rp. 9.795.434.000	Rp. 9.671.731.314	98.74%

BAB IV

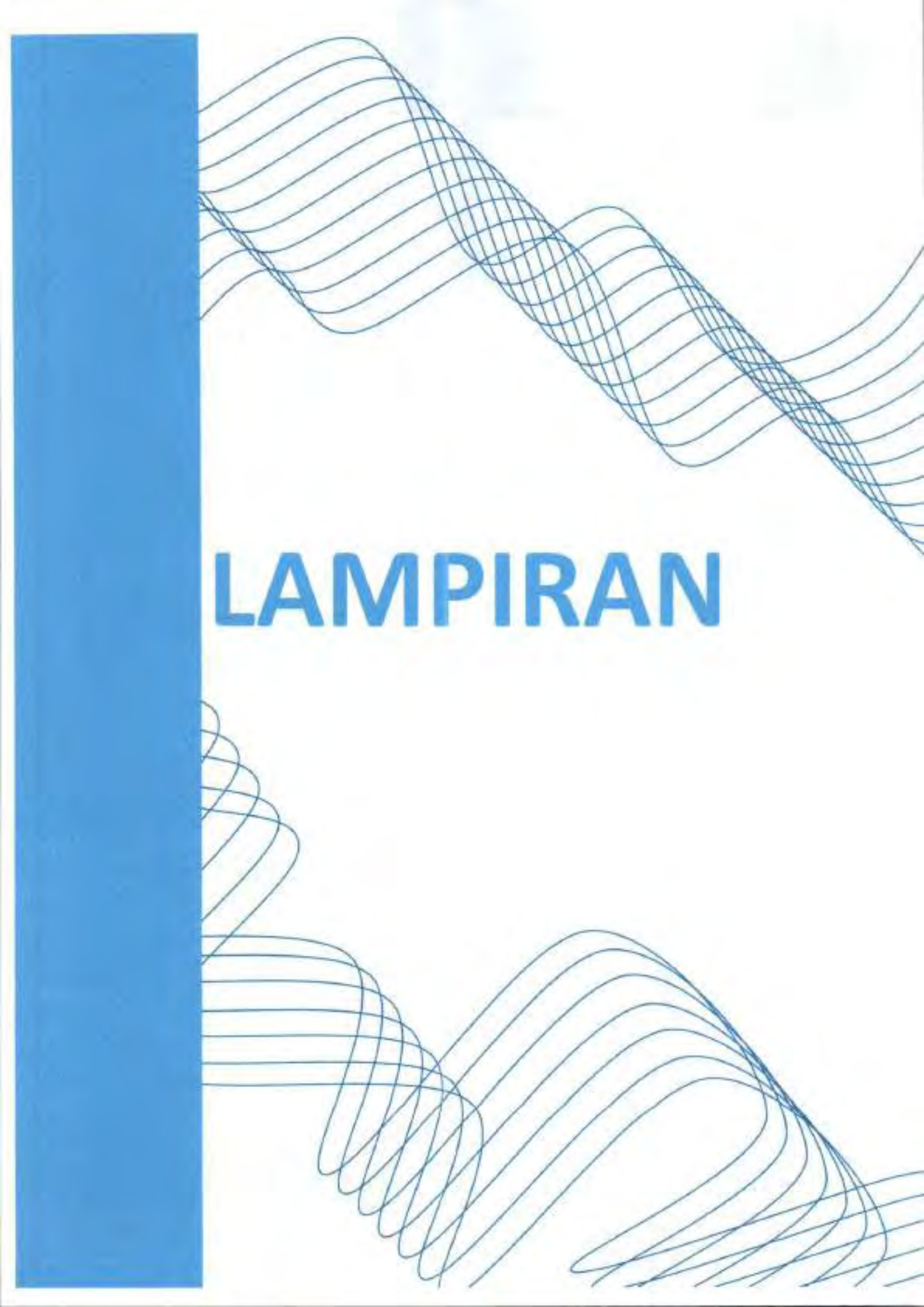
PENUTUP

Kantor Regional IX BKN Jayapura dalam menyajikan laporan kinerja Triwulan tahun 2023 didasarkan pada kemampuan kinerja bidang yang bersangkutan dalam mendukung tercapainya target sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah disepakati. Sekalipun dalam pelaksanaannya Kantor Regional IX BKN Jayapura ada yang belum mencapai target sehingga sedikit menghambat dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk itu Kantor Regional IX BKN Jayapura berusaha melakukan perbaikan dan pembenahan di segala sisi untuk dapat mencapai target yang telah di sepakati.

Laporan kinerja Kantor Regional IX Jayapura Badan Kepegawalan Negara tahun 2023 merupakan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja tahun 2023. Laporan ini diharapkan menjadi sistem yang handal untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan mulai dari perumusan kebijakan strategis, perencanaan kinerja tahunan, pengukuran kinerja, laporan akuntabilitas kinerja, serta evaluasi dan tindak lanjut atas evaluasi, berupa perbaikan atau pemecahan atas masalah yang dihadapi secara berkelanjutan.

Dari segi anggaran, Kantor Regional IX BKN dapat merealisasikan anggaran sebesar 97,83% dari jumlah pagu sebesar Rp.12.563.774.000 (Dua Belas Miliar Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) Secara umum hasil capaian kinerja Kantor Regional XI BKN Tahun 2023 sudah sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan, namun masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Hasil evaluasi kinerja dan analisis kinerja menunjukkan secara keseluruhan sasaran strategis yang direncanakan dan ditargetkan oleh Kantor Regional XI BKN Manado pada tahun 2023 dapat tercapai dengan baik.

Kiranya Laporan Kinerja Kantor Regional IX BKN Tahun 2023 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja bagi Kantor Regional IX Badan Kepegawalan Negara, pada masa-masa mendatang.



LAMPIRAN



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KANTOR REGIONAL IX BKN JAYAPURA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sabar Parlindungan Sormin
Jabatan : Kepala Kantor Regional BKN IX Jayapura

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Bima Haria Wibisana
Jabatan : Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara

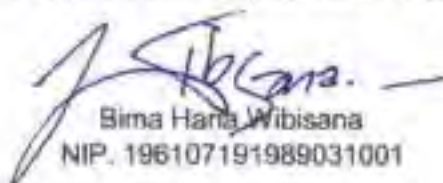
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 19 Desember 2022

Pihak Kedua
Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara


Bima Haria Wibisana
NIP. 196107191989031001

Pihak Pertama
Kepala Kantor Regional BKN IX Jayapura


Sabar Parlindungan Sormin
NIP. 196407241985031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KANTOR REGIONAL IX BKN JAYAPURA**

KODE SS	SASARAN STRATEGIS	KODE IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
STAKEHOLDER PERSPECTIVE				
SS.1	Terwujudnya instansi pemerintah yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN	IKU.1	Persentase Instansi Pemerintah yang telah mengimplementasikan Manajemen ASN sesuai NSPK (minimal bernilai A dan B) di wilayah kerja Kantor Regional IX BKN	20
		IKU.2	Persentase Instansi Pemerintah yang Melakukan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di wilayah kerja Kantor Regional IX BKN	100
CUSTOMER PERSPECTIVE				
SS.2	Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima	IKU.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang Diselenggarakan Kantor Regional IX BKN	96
		IKU.4	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kepegawaian yang Diselenggarakan Kantor Regional IX BKN	96
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE				
SS.3	Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN	IKU.5	Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis dan Instrumen Manajemen ASN di Kantor Regional IX BKN	100
SS.4	Terwujudnya peningkatan kualitas data dan sistem Informasi ASN	IKU.6	Persentase Sistem Informasi Kepegawaian Pengelola ASN yang Terintegrasi dengan SI ASN di wilayah kerja Kantor Regional IX BKN	90
SS.5	Terwujudnya peningkatan digitalisasi penyelenggaraan layanan manajemen ASN	IKU.7	Persentase Layanan Manajemen ASN yang Berbasis Digital di Kantor Regional IX BKN	100
SS.6	Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen ASN	IKU.8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian yang Ditindaklanjuti di wilayah kerja Kantor Regional IX BKN	95
LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE				
SS.7	Terwujudnya manajemen internal BKN yang efektif, efisien dan akuntabel	IKU.9	Indeks Profesionalitas ASN Kantor Regional IX BKN	80
		IKU.10	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang terstandar di Kantor Regional IX BKN	100
		IKU.11	Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kantor Regional IX BKN	63
		IKU.12	Skor atau Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kantor Regional IX BKN	80
		IKU.13	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Regional IX BKN	93
		IKU.14	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat di Kantor Regional IX BKN	100

Kode/ KRO	Kegiatan	Pagu Alokasi
3630	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp. 18.950.000
EBA.959	Layanan Protokol	Rp. 1.950.000
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	Rp. 17.000.000
4842	Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp. 58.000.000
EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Rp. 43.950.000
EBC.954	Layanan Manajemen SDM	Rp. 14.050.000
4843	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp. 10.136.799.000
EBA.994	Layanan Perkantoran	Rp. 8.859.389.000
EBA.956	Layanan BMN	Rp. 28.100.000
EBB.971	Layanan Prasarana Internal	Rp. 1.114.475.000
EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	Rp. 14.275.000
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp. 64.359.000
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp. 56.200.000
4846	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian ASN	Rp. 461.000.000
BAB.003	Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pejabat Negara	Rp. 161.000.000
BAB.002	Penetapan Kenaikan Pangkat	Rp. 200.000.000
BAB.001	Penetapan NIP	Rp. 100.000.000
4847	Pengelolaan Dokumen Arsip Kepegawaian, Data dan Sistem Informasi ASN	Rp. 304.000.000
FAA.002	Dokumen Arsip Kepegawaian ASN	Rp. 304.000.000
4848	Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN	Rp. 605.400.000
BDB.003	Bimbingan Teknis Pengawasan dan Pengendalian Wilayah III	Rp. 605.400.000
TOTAL PAGU ALOKASI		Rp. 11.584.149.000

Pihak Kedua
Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara


Bima Hari Wibisona
NIP. 196107191989031001

Jakarta, 19 Desember 2022
Pihak Pertama
Kepala Kantor Regional BKN IX Jayapura


Sabar Parlindungan Sormin
NIP. 196407241985031001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
REFORM/INOVASI
KANTOR REGIONAL IX BKN JAYAPURA**

Sasaran Strategis		IKU		Reform/Inovasi
CUSTOMER PERSPECTIVE				
SS 2	Terwujudnya Pembinaan dan Pelayanan Kepegawaian yang Berkualitas Prima	IKU 3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang Diselenggarakan Kantor Regional VII BKN	Pembinaan dan Asistensi Instansi Daerah secara intensif dengan follow up langsung ke daerah yang dituju.

Pihak Kedua
Pit. Kepala Badan Kepegawaian Negara


Bima Harta Wibisana
NIP. 196107191989031001

Pihak Pertama
Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura


Sabar Parlindungan Somlin
NIP. 196407241985031001



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jendral Sutoyo Nomor 12 Cililitan, KramatJati, Jakarta Timur 13640

Telepon(021) 8093008; Faksimile (021) 8090421

Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

NOTA DINAS

Nomor : 036/B-MP.03.01/ND/D/2023

Kepada Yth : Kepala Kantor Regional I – XIV BKN
Dari : Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian
Lampiran : 1 (satu) lampiran
Perihal : Penyampaian Capaian Realisasi Layanan Manajemen ASN yang Berbasis Digital

Menindaklanjuti hasil Penyampaian Overview Indikator Kinerja pada tanggal 1 Agustus 2023, telah disepakati bersama bahwa Kedeputian Bidang Mutasi Kepegawaian akan menginformasikan capaian realisasi layanan manajemen ASN yang berbasis digital kepada seluruh Kantor Regional BKN.

Sehubungan dengan hal tersebut, berikut kami sampaikan capaian realisasi layanan manajemen ASN yang berbasis digital di lingkungan Kedeputian Bidang Mutasi Kepegawaian untuk triwulan IV TA 2023 sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 15 Desember 2023

Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian

 Dr. Ari Wulandari, M.P.



19.	Tewas	✓	-	✓	-	
20.	Perbaikan Data	✓	-	✓	-	

Perhitungan Capaian Realisasi Kedeputian Bidang Mutasi Kpegawalan:

IKU 5 Persentase Layanan Manajemen ASN yang Berbasis Digital

Formula

$$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Jumlah layanan berbasis digital}}{\text{Total jumlah pelayanan}} \right) \times 100 \%$$

$$= \frac{15}{20} \times 100 \%$$

$$= 75\%$$

Target Renstra	Realisasi 2022	Target TW IV 2023	Realisasi Triwulan IV 2023	Capaian
77%	70%	90%	75%	83,33%



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640

Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421

Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

Nomor : 041/AI.03/LHE/H/2023

Lampiran : -

Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
pada Kantor Regional IX BKN Jayapura Tahun 2023

Yth. **Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura**

di
Jayapura

A. Pendahuluan

1. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara;
- f. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32.1 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
- g. Surat Tugas Inspektur Nomor 029/AI.03/TU/H/2023 tanggal 26 April 2023 dan Surat Perpanjangan Tugas Nomor 002/AI.03/SPT/H/2023 tanggal 26 Juni 2023.

2. Latar Belakang Evaluasi

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel serta meningkatnya kualitas pelayanan publik masyarakat.

Evaluasi AKIP diharapkan dapat mendorong Instansi Pemerintah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (Hasil) yang telah direncanakan.

a. Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong Instansi Pemerintah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.

Tujuan evaluasi AKIP secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi SAKIP yang ditetapkan, yaitu untuk

- 1) Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- 2) Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- 3) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- 4) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- 5) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

b. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka Panjang, perencanaan kinerja jangka Menengah, perencanaan kinerja jangka Pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan

monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja. Evaluasi AKIP di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara dilaksanakan pada unit kerja setingkat level JPT Madya, unit kerja setingkat level JPT Pratama Mandiri, dan satuan kerja. Dalam Penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. Penilaian pengukuran Kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempumaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

c. Metodologi Evaluasi

Metode Evaluasi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP merupakan kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada.

B. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Kantor Regional IX BKN Jayapura

Implementasi penyelenggaraan sakip pada Kantor Regional IX BKN Jayapura pada tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Terwujudnya instansi pemerintah yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN	Persentase Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan Tata Kelola Manajemen ASN sesuai NSPK di Wilayah Kerja Kantor Regional	40%	3.33%	8.33%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
		IX BKN Jayapura			
		Persentase Instansi Pemerintah yang melakukan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura	75%	100%	100%
2.	Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang Diselenggarakan Kantor Regional IX BKN Jayapura	90	0	0%
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kepegawaian yang Diselenggarakan Kantor Regional IX BKN Jayapura	90	91	101.11 %
3.	Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis Manajemen ASN	Persentase pemenuhan regulasi teknis dan instrumen Manajemen ASN di Kantor Regional IX BKN Jayapura	100%	100%	100%
4.	Terwujudnya peningkatan kualitas data dan sistem informasi ASN	Persentase Sistem Informasi Kepegawaian Pengelola ASN yang terintegrasi dengan SI ASN di wilayah kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura	75%	18.18%	24.24%
5.	Terwujudnya peningkatan digitalisasi penyelenggaraan layanan manajemen ASN	Persentase layanan manajemen ASN yang berbasis digital di Kantor Regional IX BKN Jayapura	60%	69,23%	115,38 %
6.	Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan	85%	100%	117,65 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	pengendalian pelaksanaan manajemen ASN	Pengendalian Kepegawain yang ditindaklanjuti di wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura			
7.	Terwujudnya manajemen internal BKN yang efektif, efisien, dan akuntabel	Indeks Profesionalitas ASN Kantor Regional IX BKN Jayapura	80	76,08	95,11 %
		Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang terstandar di Kantor Regional IX BKN Jayapura	80%	100%	125%
		Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kantor Regional IX BKN Jayapura	80	77,29	96,61
		Skor atas Hasil Evaluasi AKIP Kanreg IX BKN Jayapura	74	70,60	95,40%
		Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kanreg IX BKN Jayapura	85%	94,24%	110,87 %
		Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat di Kanreg IX BKN Jayapura	100%	100%	100%

C. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Kantor Regional IX BKN Jayapura telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya, namun masih terdapat beberapa rekomendasi belum ditindaklanjuti, diantaranya sebagai berikut:

1. Laporan kinerja mengungkapkan analisis terhadap efisiensi penggunaan sumber daya.

2. Membuat SOP pengumpulan data kinerja yang memadai dan Menerapkan SOP Pengumpulan Data Kinerja serta SOP Monev Rencana Aksi, pembagian tugas yang jelas sesuai SOP dan dilakukan evaluasi dalam implementasinya;
3. Membuat penjelasan atau analisa perbaikan pada Renja jika terdapat perbaikan nomenklatur terkait perubahan IKU;
4. Dokumen Renja, Renstra dan LAKIP agar dipublikasikan tepat waktu di website Kanteng IX BKN Jayapura
5. Melakukan monitoring dan evaluasi rencana aksi atas target kinerja secara berkala/periodik, untuk dapat segera diketahui apabila terdapat permasalahan terkait ketidaksesuaian capaian kinerja dengan target yang direncanakan, sebagai dasar pimpinan melakukan pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan untuk pencapaian target;
6. Untuk mendokumentasikan setiap kegiatan dalam rangka kegiatan perencanaan mulai dari penyusunan sampai dengan monev tindak lanjutnya;
7. Untuk menindaklanjuti semua rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

D. Gambaran Hasil Evaluasi

Hasil Evaluasi Tahun 2023 "Tidak Diperbandingkan" dengan evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Keputusan Kepala BKN Nomor 321.1 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Kepegawainan Negara, terdapat perubahan bobot komponen dan subkomponen serta kriteria maupun teknis penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitik beratkan pada implementasi akuntabilitas kinerja pada tingkat unit kerja maupun Satuan Kerja.

Evaluasi atas implementasi penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Regional IX BKN Jayapura memperoleh hasil nilai simpulan 65,00 dengan predikat B (*Baik, Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja/satuan kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level JPT Pratama/unit kerja/satuan kerja*), adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas Perencanaan Kinerja pada Kantor Regional IX BKN Jayapura memperoleh nilai **21,30** , hal ini disebabkan:

a. Keberadaan

Kantor Regional IX BKN Jayapura telah mempunyai pedoman teknis perencanaan kinerja, dan telah menyusun dokumen perencanaan kinerja seperti Rencana Strategis (RENSTRA), Renja, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi selama 5 (lima) tahun.

b. Kualitas

Kantor Regional IX BKN Jayapura telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang sudah diformalkan, dan mempunyai kualitas sebagai berikut :

- 1) Sudah menggambarkan kebutuhan atas kinerja yang sebenarnya
- 2) Kualitas sasaran/tujuan telah menggambarkan dengan jelas kondisi yang akan dicapai.
- 3) Indikator Kinerja dalam dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi kriteria SMART
- 4) Indikator Kinerja Utama telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus tercapai dan tertuang secara berkelanjutan
- 5) Dapat menggambarkan hubungan yang berkesinambungan/selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan
- 6) Dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting)
- 7) Setiap Pegawai menetapkan dan merumuskan perjanjian kinerja

Namun, kualitas perencanaan kinerja masih terdapat kelemahan yaitu

- 1) Terdapat beberapa indikator kinerja yang belum relevan, yaitu :
 - a) IKU 2 dikarenakan sumber data yang digunakan dalam pengukuran kinerja tidak menggambarkan tujuan/sasaran yang ini dicapai.
 - b) IKU 5 dan 6 dikarenakan indikator tersebut belum relevan dengan kewenangan maupun tugas pokok fungsi dari Kantor Regional
- 2) Dokumen perencanaan kinerja belum dipublikasikan pada website Kantor Regional IX BKN Jayapura secara up to date.

- 3) Target kinerja yang ditetapkan juga belum sepenuhnya achievable dan realistis. Hal ini dilihat dari capaian kinerja di tahun sebelumnya tidak tercapai namun target kinerja di tahun berjalan tidak disesuaikan bahkan terjadi peningkatan target dari tahun sebelumnya yaitu untuk IKU 1, IKU 6, IKU 7, IKU 11 dan IKU 12.

c. Pemanfaatan

Kantor Regional IX BKN Jayapura telah memanfaatkan dokumen perencanaan kinerja untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan dalam hal :

- 1) Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai
- 2) Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai
- 3) Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala
- 4) Setiap unit/satuan kerja berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan
- 5) Setiap Pegawai berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan

Namun, target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja belum dapat dicapai dengan optimal dikarenakan masih terdapat penyusunan target dalam rencana aksi yang tidak sesuai dengan jenis perhitungan data dan periode pelaporan yang tertuang pada Manual IKU (IKU 1, IKU 3, IKU 4, IKU 6, IKU 8, IKU 9 dan IKU 12), serta belum terdapat dokumen perbaikan/penyempurnaan perencanaan kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis sebelumnya dan untuk mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.

2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas Pengukuran Kinerja pada Kantor Regional IX BKN Jayapura memperoleh nilai **20,40**, hal ini disebabkan:

a. Keberadaan

Kantor Regional IX BKN Jayapura telah mempunyai pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja serta telah mempunyai dokumen pengukuran kinerja yang sudah didefinisikan dan dirumuskan

dengan secara jelas. Namun, Kantor Regional IX BKN Jayapura belum mempunyai Sistem Operasional Prosedur tentang pengumpulan data kinerja di satuan kerja nya.

b. Kualitas

Pengukuran kinerja pada Kantor Regional IX BKN Jayapura telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja.
- 2) Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala
- 3) Setiap level komponen organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang

Namun, kualitas pengukuran kinerja masih terdapat kelemahan yaitu

- 1) Data kinerja yang dikumpulkan belum sepenuhnya mendukung capaian kinerja yang diharapkan dikarenakan masih terdapat perbedaan cara pengukuran kinerja antara di dokumen laporan kinerja dan manual IKU yaitu pada IKU 1, IKU 3, IKU 4 dan IKU 7;
- 2) Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi (Aplikasi).

c. Pemanfaatan

Pengukuran Kinerja pada Kantor Regional IX BKN Jayapura telah dimanfaatkan menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, dan dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional. Selain itu, pengukuran kinerja juga telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi, penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja, penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja, penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja, dan penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja. Serta setiap komponen organisasi unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

Namun, pemanfaatan atas pengukuran kinerja pada Kantor Regional IX BKN Jayapura masih belum optimal dikarenakan yaitu:

- 1) Efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja belum dapat dibuktikan dengan dijelaskan didalam Laporan Kinerja;
- 2) Pemahaman dan kepedulian hasil pengukuran kinerja Satuan kerja oleh setiap pegawai belum dapat dibuktikan karena notulen hasil evaluasi capaian kinerja hanya melibatkan Kepala Bagian/ Bidang di Lingkungan Kantor Regional IX BKN Jayapura.

3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas Pelaporan Kinerja pada Kantor Regional IX BKN Jayapura memperoleh nilai **8,55**, hal ini disebabkan:

a. Keberadaan

Kantor Regional IX BKN Jayapura telah menyusun Laporan Kinerja secara berkala, diformalkan dan tepat waktu. Namun, Laporan Kinerja belum dipublikasikan di website Kantor Regional IX BKN Jayapura.

b. Kualitas

Dokumen Laporan Kinerja pada Kantor Regional IX BKN Jayapura telah menggambarkan:

- 1) Seluruh informasi tentang pencapaian kinerja
- 2) Informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan
- 3) Informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah
- 4) Informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya
- 5) Informasi upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Namun, Laporan kinerja yang disajikan masih memiliki kelemahan yaitu :

- 1) Laporan Kinerja yang disusun belum memenuhi kualitas pelaporan yang baik karena masih terdapat perbedaan target antara yang di Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja serta perbedaan realisasi kinerja antara yang di tabel dan penjelasan. Adapun rinciannya sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Perjanjian Kinerja	Target di Laporan Kinerja	Keterangan
1.	Terwujudnya instansi pemerintah yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN	Persentase Instansi Pemerintah yang melakukan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura	75%	100%	-
2.	Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang Diselenggarakan Kantor Regional IX BKN Jayapura	90	95	Penjelasan di Laporan Kinerja realisasi dijadikan satu. Dimana IKM hanya membahas terkait IKM pelayanan dan kuesioner tidak sesuai dengan Permenpan yang memuat 9 unsur
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kepegawaian yang Diselenggarakan Kantor Regional IX BKN Jayapura	90	95	
4.	Terwujudnya peningkatan kualitas data dan sistem informasi ASN	Persentase Sistem Informasi Kepegawaian Pengelola ASN yang terintegrasi dengan SI ASN di wilayah kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura	75%	95%	-
5.	Terwujudnya peningkatan digitalisasi penyelenggaraan layanan manajemen ASN	Persentase layanan manajemen ASN yang berbasis digital di Kantor Regional IX BKN Jayapura	80%	100%	Penjelasan yang terdapat di Laporan Kinerja sebenarnya realisasi hanya 69,23% namun di table realisasi sejumlah 100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Perjanjian Kinerja	Target di Laporan Kinerja	Keterangan
7	Terwujudnya manajemen internal BKN yang efektif, efisien, dan akuntabel	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang terstandar di Kantor Regional IX BKN Jayapura	80%	100%	125%
		Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kantor Regional IX BKN Jayapura	80	82	96,61
		Skor atas Hasil Evaluasi AKIP Kanreg IX BKN Jayapura	74	79	95,40%
		Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kanreg IX BKN Jayapura	85%	93%	110,87%

- 2) Informasi kinerja pada laporan Kinerja belum seluruh nya menginfokan kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja serta upaya nyata dan/atau hambatannya;
- 3) Laporan Kinerja belum menginfokan analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

c. Pemanfaatan

Pemanfaatan Laporan Kinerja pada Kantor Regional IX BKN Jayapura kurang memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya dikarenakan :

- 1) Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya menjadi kepedulian seluruh pegawai dibuktikan dengan kegiatan evaluasi terkait capaian kinerja tidak pernah melibatkan seluruh pegawai di lingkungan Kantor Regional IX BKN Jayapura
- 2) Informasi dalam laporan kinerja berkala belum digunakan dalam penyesuaian dan pencapaian aktivitas untuk mencapai kinerja dibuktikan dengan tidak terdapat perbaikan atau penyempurnaan rencana aksi

dalam tahun berjalan dikarenakan dari hasil analisis yang disajikan dalam laporan kinerja berkala

- 3) Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya
- 4) Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi perubahan budaya kinerja unit kerja/satuan kerja

Meskipun tersebut, informasi dalam laporan kinerja sudah menjadi perhatian utama pimpinan yang bertanggung jawab dan telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.

4. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Kantor Regional IX BKN Jayapura memperoleh nilai **14,75**, hal ini disebabkan:

a. Keberadaan

Kantor Regional IX BKN Jayapura telah mempunyai Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas kinerja internal serta evaluasi telah dilaksanakan pada seluruh komponen organisasi dan dilaksanakan secara berjenjang.

b. Kualitas

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Kantor Regional IX BKN Jayapura belum sepenuhnya dilaksanakan secara berkualitas meskipun Sumber Daya Manusia yang ada sudah memadai. Hal ini dibuktikan bahwa:

- 1) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum disusun sesuai dengan standar dan dengan analisa yang mendalam dikarenakan dalam evaluasi NPSS Tahun 2022 dan 2023 tidak menuangkan nilai anggaran dan realisasi serta Tindak Lanjut;
- 2) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum memanfaatkan teknologi informasi (Aplikasi).

c. Pemanfaatan

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Kantor Regional IX BKN Jayapura belum sepenuhnya memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja dikarenakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal Tahun 2021 sudah dibuat dengan menjelaskan rekomendasi ke depan. Namun, upaya tindak lanjut yang disampaikan di Rencana Aksi Tahun 2022 dan Laporan Kinerja Tahun 2022 belum dituangkan sesuai

dengan rekomendasi yang ada serta terdapat beberapa indikator yang capaian kinerja nya turun dari tahun 2021 ke tahun 2022 sehingga tidak dapat memberikan bukti konkret untuk peningkatan implementasi SAKIP.

E. Penutup

Berdasarkan hasil uraian diatas serta dalam meningkatkan keefektifan penerapan budaya kinerja, kami merekomendasikan kepada Kantor Regional IX BKN Jayapura beberapa hal sebagai berikut :

1. Agar mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja pada website resmi Kantor Regional IX BKN Jayapura, serta dilakukan pembaharuan secara rutin tiap tahun;
2. Agar menetapkan target kinerja setiap tahun dengan mempertimbangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya (*achievable*) dari target pada Perjanjian Kinerja Kepala BKN (*inline*);
3. Agar menyusun rencana aksi yang sesuai dengan:
 - a. Jenis Perhitungan Data dan Periode Pelaporan didalam Manual IKU yang sudah diformalkan untuk target kinerjanya
 - b. Rekomendasi evaluasi internal tahun sebelumnya dan upaya perbaikan/penyempurnaan yang diuraikan di dalam Laporan Kinerja tahun sebelumnya untuk indikator kegiatan yang direncanakan;
4. Agar menyusun perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja apabila terdapat perubahan target maupun nomenklatur yang tidak sesuai perencanaan awal;
5. Agar menyusun Sistem Operasional Prosedur terkait mekanisme pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja di Lingkungan Kantor Regional IX BKN Jayapura yang jelas untuk disetiap IKU;
6. Agar melakukan pengukuran kinerja di tahun berjalan yang sesuai dengan perumusan yang tertuang di dokumen manual IKU;
7. Agar melakukan penyusunan revisi atas Manual IKU yang disesuaikan dengan Pedoman Petunjuk Teknis Keputusan Kepala BKN Nomor 1.6/KEP/2020 tentang Pedoman Umum Pengumpulan Data Kinerja Badan Kepegawaian Negara.

8. Agar berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan organisasi untuk memanfaatkan teknologi informasi di dalam pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja serta evaluasi kinerja internal;
9. Agar menyajikan informasi target, realisasi kinerja maupun capaian kinerja selama periode renstra (selama 5 tahun) pada Laporan Kinerja Tahunan;
10. Agar menyajikan informasi mengenai upaya kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja serta upaya nyata dan/atau hambatan pada laporan kinerja yang disusun baik triwulan maupun tahunan;
11. Agar menyajikan informasi pada laporan kinerja yang relevan, lengkap dan sesuai dengan kondisi yang ada maupun cara pengukuran kinerja dalam dokumen manual IKU;
12. Agar melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan melibatkan seluruh komponen organisasi dan pegawai di lingkungan Kantor Regional IX BKN Jayapura secara berkala dan didokumentasikan dengan jelas;
13. Agar menyusun laporan evaluasi akuntabilitas kinerja internal di lingkungan Kantor Regional IX BKN Jayapura dengan analisis yang mendalam dan mendetail dari mulai sasaran, program hingga kegiatan;
14. Agar mengintensifkan dialog kinerja dengan melibatkan seluruh pegawai di Lingkungan Kantor Regional IX BKN Jayapura;
15. Agar berkoordinasi ke Biro Perencanaan dan Organisasi untuk meminta pendampingan di dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Kantor Regional IX BKN Jayapura.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada Kantor Regional IX BKN Jayapura tahun 2023. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajarannya dalam menerapkan SAKIP di lingkungan Unit Kerja/Satuan Kerja Saudara. Terima Kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.

Jakarta, 4 September 2023

Mengetahui,
Pit. Inspektur

A.n Tim Evaluasi,
Pengendali Teknis

IRBY ECHYANY, E.S.Ah., M.Si



URHO HORBAWANGHANG, B.M.B., S.Pd

Tembusan :

1. PIt. Kepala BKN;
2. Sekretaris Utama;
3. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi;

